

# PELITA YANG MEREDUP:

KeberAGAMAAn GURU  
Sekolah/Madrasah di  
Indonesia

Survei Nasional:  
Sikap Keberagaman Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia

PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia



# DAFTAR ISI

## **RINGKASAN EKSEKUTIF, 1**

## **REKOMENDASI, 10**

### **I LATAR BELAKANG, 10**

- Rumusan Masalah Penelitian, 17

### **II FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI, 17**

- Fokus Kajian, 17
- Metode Penelitian, 18
- Sampel dan *Margin of Error*, 19

### **III LEVEL INTOLERANSI DAN RADIKALISME GURU DI INDONESIA, 20**

- Intoleransi Guru, 20
- Radikalisme Guru, 22
- Faktor Pendorong Radikalisme dan Intoleransi, 23

### **IV PANDANGAN KEISLAMAN, 25**

- Sumber Pengetahuan dan Klaim Kebenaran, 26

### **V. FAKTOR DEMOGRAFI, 26**

- Gender, 26
- Tingkat Satuan Pendidikan, 33
- Profil Guru, 37
- Status Kepegawaian Guru, 38
- Sertifikasi Guru, 46
- Penghasilan Guru, 48

### **VI SUMBER PENGETAHUAN DAN ORMAS KEISLAMAN, 50**

- Medsos sebagai Sumber Pengetahuan Agama, 50
- Tokoh Agama Panutan Guru, 51
- Ormas Kegamaan, 51
- Organisasi Keislaman Kampus, 52

### **VII KESIMPULAN & REKOMENDASI, 53**

- Kesimpulan, 53
- Rekomendasi, 54

## **PROFIL PENULIS, 56**

## **PROFIL LEMBAGA, 56**

## **BIBLIOGRAFI, 57**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan serta sikap keberagaman guru sekolah/madrasah di Indonesia. Guru memiliki posisi strategis dan punya peran yang penting dalam pembentukan nilai-nilai, pandangan serta pemikiran siswa. Dengan nilai-nilai, pandangan, dan pemikiran guru yang mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan, konsolidasi demokrasi dan ruang yang membentuk keadaban publik, terutama yang mampu menginspirasi siswanya, kontribusi guru sangat diharapkan untuk merawat kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

Namun sayangnya, hasil survei nasional PPIM 2017 tentang “Sikap Keberagaman Gen Z di Sekolah dan Universitas “Api dalam Sekam” di Indonesia” (PPIM, 2017) menunjukkan bahwa siswa SMA/K/MA menunjukkan opini intoleransi dan opini radikal yang tinggi. Selain itu, guru memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat intoleransi siswa. Selain dengan guru agama, siswa mendiskusikan masalah keagamaan dengan guru mata pelajaran lainnya (PPIM, 2017). Riset kualitatif yang dibukukan dalam “Menjaga benteng Kebhinnekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon (Maarif Institute, 2017) juga menunjukkan temuan serupa, dimana guru dan kepala sekolah adalah aktor-aktor penting dalam konteks ini. Selain itu, fenomena maraknya kecenderungan intoleran dan radikalisme agama tidak hanya terjadi pada siswa sekolah menengah, namun juga terjadi pada level pendidikan paling dini sekalipun (Miris Tepuk Anak Saleh, 2018; Dita Siska, 2017; Saya ingin ISIS di seluruh dunia, 2018). Kecenderungan ekspresi keagamaan ini sudah tampak sejak level pendidikan awal seperti Taman kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA). Untuk itulah survei PPIM 2018 memfokuskan pada guru dari berbagai level pendidikan, yaitu dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/K/MA serta yang mengampu pada semua mata pelajaran. Fenomena ekspresi keagamaan di masyarakat dan hasil survei PPIM 2017 cukup mengejutkan dan sekaligus memberikan alarm bagi kita semua, bahwa guru sebagai “Pelita itu Meredup.”

## **KONSEP YANG DIGUNAKAN**

*Religious intolerance* adalah ketidaksediaan untuk mempersilakan pemeluk agama lain mengekspresikan ide/kepentingan yang berbeda (Sullivan et al. 1982).

Radikalisasi mengacu pada adopsi pandangan kelompok ekstremis untuk memengaruhi perubahan sosial atau politik (Mohammed Hafez, 2015); serta menggunakan cara yang menolak prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai tujuan politik (O' Ashour, 2009).

Pada survei ini digunakan Two Pyramid Model Theory (Mc Cauley & Moskalkenko, 2017), yang menyatakan bahwa radikalisasi bisa berada dalam tahapan opini dan juga tahapan aksi. Namun demikian, tidak semua opini radikal akan menghasilkan aksi radikal.

Konsep pandangan Islamis dalam survei ini, mengacu pada pandangan Islam absolut, yang cenderung bersifat tertutup, *inward looking*, dan eksklusif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang diidentifikasi sebagai "bukan bersifat/bersumber Islam" (Harris, 2008 dan Ruthven 2004)

## **METODE PENELITIAN**

Target populasi survei PPIM 2018 adalah guru Muslim di sekolah/madrasah pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/K/MA yang menguasai semua mata pelajaran di Indonesia. Mengapa kami memfokuskan pada guru Muslim? Hal ini karena PPIM memang memfokuskan bidang kajian dan penelitiannya pada topik terkait ke-Islam-an dan masyarakat. Untuk itulah, kami mengambil unit populasi guru Muslim di semua level pendidikan.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu antara 6 Agustus s.d. 6 September 2018. Sampel penelitian diambil dari 34 provinsi di Indonesia, dimana pada setiap provinsi dipilih kabupaten/kota secara acak (*random*) berdasarkan teknik *probability proporsional to size* (PPS) pada jumlah guru yang ada di tiap provinsi di Indonesia, baik yang di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kemenag. Dari proses pemilihan kab/kota, diperoleh 767 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota terbanyak yang terpilih menjadi sampel adalah pada provinsi yang memiliki jumlah guru terbanyak, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara jumlah guru yang paling sedikit berada di provinsi Kalimantan Utara. Dari jumlah kabupaten/kota terpilih, ditentukan sekolah/madrasah secara random yang juga menggunakan teknik PPS. Setelah sekolah/madrasah ditentukan dengan proses random,

maka petugas survei mendapatkan kerangka sampel guru Muslim yang ada di sekolah terpilih. Untuk menentukan sampel guru di sekolah/madrasah terpilih, kami menggunakan teknik *circular systematic random sampling* berdasarkan jenis kelamin guru. Hal ini dilakukan agar proporsi jumlah sampel guru yang berjenis kelamin laki-laki adalah sama dengan jumlah guru laki-laki di sekolah tersebut. Begitu pula pada guru perempuan. Total jumlah sampel guru dalam survei ini adalah 2.237 orang, dengan gambaran yang lebih lengkap sebagai berikut:

Deskripsi	N	%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	1335	59,79
Laki-laki	898	40,21
<b>Profesi</b>		
Guru	1638	73,35
Kepala Sekolah	595	26,65
<b>Kategori Sekolah/Madrasah</b>		
Negeri	1172	52,39
Swasta	1065	47,61
<b>Tempat Tinggal</b>		
Desa	1335	59,73
Kota	900	40,27
<b>Status Ekonomi</b>		
≤1.000.000	603	26,97
1.000.000-2.500.000	565	25,27
2.500.000-5.000.000	740	33,09
5.000.000-7.500.000	231	10,33
≥7.500.000	97	4,34
<b>Status Kepegawaian</b>		
PNS	925	41,37
Tetap non-PNS	270	12,08
Tetap Yayasan	562	25,13
Tidak Tetap/Honorer	479	21,42



### Sertifikasi Guru

Tersertifikasi	1195	53,44
Belum Tersertifikasi	1041	46,56

### Profil Guru

Bahasa	316	14,13
MIPA	299	13,37
Ilmu Sosial	146	6,53
PAI & Budi Pekerti	439	19,62
Seni & Keterampilan	154	6,88
BK	39	1,74
Guru Kelas	631	28,21
Kepala Sekolah	205	9,16
Lainnya	8	0,36

---

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur untuk mengukur tingkat intoleransi dan radikalisme. Pertama, alat ukur *Implicit Association Test* (IAT) digunakan untuk melihat potensi intoleransi dan radikalisme secara implisit. Alat ukur implisit ini digunakan mengingat topik penelitian ini relatif sensitif sehingga bisa digunakan sebagai media pengecekan akan akurasi hasil pengukuran dengan menggunakan skala dan kuesioner. Kedua, penelitian menggunakan kuesioner *self-report* dalam menilai intoleransi dan radikalisme serta faktor-faktor yang memengaruhi intoleransi dan radikalisme. Penekanan dalam survei ini adalah pada persoalan-persoalan toleransi beragama di Indonesia, seperti pandangan mereka tentang kebebasan beragama, hubungan antar kelompok agama yang berbeda dan lain-lain.

Penelitian ini juga menggali persepsi mereka tentang islamisme (hubungan agama dan negara), seperti pandangan mereka tentang ilmu pengetahuan, Pancasila dan UUD 1945, jihad, serta kesesuaian Islam dengan demokrasi.

Survei ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1: Seberapa besar intoleransi guru sekolah/madrasah di Indonesia?
- 2: Seberapa besar radikalisme guru sekolah/madrasah di Indonesia?

3: Faktor-faktor apa sajakah yang berkontribusi terhadap intoleransi dan radikalisme guru?

### **BEBERAPA TEMUAN**

Temuan terkait opini intoleran guru terhadap pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda adalah sebagai berikut:

Bila dilihat skor opini toleransi guru baik dari alat ukur implisit maupun alat ukur kuesioner, hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan alat IAT yang implisit, sebesar 63,07% guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain. Sedangkan dengan menggunakan alat ukur eksplisit, sebesar 56,90% guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain.

Hasil opini intoleransi pada pemeluk agama lain ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruksinya. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah "Non-Muslim boleh mendirikan rumah ibadah mereka di lingkungan Ibu/Bapak tinggal" dan "Tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan (misal: Kebaktian pada pemeluk Kristen, atau Mesodan bagi pemeluk Hindu) di kediaman mereka." Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur opini intoleransi pada pemeluk agama lain.

Selain opini intoleran, survei ini juga melihat intensi-aksi intoleran guru. Intensi-aksi intoleran pada pemeluk agama lain ini diukur dengan menggunakan 5 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruksinya. Instruksi yang diberikan adalah: Bila ada kesempatan, maka apakah guru sangat tidak ingin melakukan s.d. sangat ingin melakukan tindakan yang ada dalam pernyataan yang diberikan. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah "Menandatangani petisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama" dan "Menandatangani petisi menolak pendirian sekolah berbasis agama non-Islam di sekitar tempat tinggalnya." Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur intensi-aksi intoleransi pada pemeluk agama lain.

Bila dilihat skor opini radikal guru baik dari alat ukur implisit (IAT) maupun alat ukur eksplisit (kuesioner), hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan alat ukur implisi (IAT), sebesar 14,28% guru

memiliki opini yang sangat radikal dan radikal. Sedangkan dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang eksplisit, guru memiliki opini yang sangat radikal dan radikal sebesar 46,09%.

Hasil opini radikal guru ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruksinya. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah "menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam" dan "ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irak dalam memperjuangkan berdirinya negara Islam." Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur opini radikal guru.

Selain opini radikal, survei ini juga melihat intensi-aksi radikal guru. Intensi-aksi radikal guru ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruksinya. Instruksi yang diberikan adalah: Bila ada kesempatan, maka apakah guru sangat tidak ingin melakukan s.d. sangat ingin melakukan tindakan yang ada dalam pernyataan yang diberikan. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah "menganjurkan orang lain agar ikut berperang dalam mewujudkan negara Islam." dan "menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara Islam." Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur intensi-aksi radikal.

### **Faktor apa saja yang terkait dengan intoleransi dan radikalisme guru?**

Ada tiga hal yang dapat dikaitkan dengan intoleransi dan radikalisme guru. Pertama adalah pandangan Islamis. Kedua, aspek demografis, dan Ketiga, adalah peran ormas dan sumber pengetahuan ke-Islaman.

Berikut ini penjelasan masing-masing faktor terkait Intoleransi dan radikalisme guru.

#### **1. Pandangan Islamis**

Faktor Islamisme menjadi satu variabel yang penting terkait intoleransi dan radikalisme guru. Pandangan ke-Islaman guru mengacu pada aspek bagaimana syariat Islam diterapkan dalam semua ranah politik, memperlihatkan corak yang disebut sebagai

Pemahaman Islamis-radikal menekankan pentingnya syariat dijadikan sumber referensi utama dalam semua aspek kehidupan.

Berikut ini gambaran Islamisme guru Indonesia:

1. Sebanyak 40.36% guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat.
2. Sebanyak 82.77% guru setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat.
3. Sebanyak 62.22% guru setuju bahwa hanya sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam yang terbaik untuk negeri ini.
4. Sebanyak 75.98% guru setuju bahwa pemerintah harus memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya.
5. Sebanyak 79.72% guru setuju bahwa dalam memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota), umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam.
6. Sebanyak 23.42% Guru setuju bahwa pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah thaghut karena telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum.
7. Sebanyak 64.23% Guru setuju bahwa non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi Presiden di Indonesia.

Guru yang setuju bahwa umat Islam tidak perlu lagi mempelajari sumber-sumber pengetahuan dari Barat mencapai 40.36%. Jumlah yang cukup besar. Pandangan guru ini dapat ditafsirkan sebagai keyakinan mereka tentang Islam yang absolut. Sebab, Islam dipahami sebagai "paling sempurna dan mencakup semuanya" sehingga harus menjadi satu-satunya sumber rujukan dalam memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pengetahuan.

Cara pandang absolut demikian merupakan salah satu ciri penting dalam fundamentalisme keagamaan (Harris, 2008 dan Ruthven 2004). Karena pandangannya yang demikian, para

penganutnya cenderung bersifat tertutup, *inward looking*, dan eksklusif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang diidentifikasi sebagai “bukan bersifat/ bersumber Islam”.

## 2. Aspek Demografis

Berbagai aspek demografis dapat dikaitkan dengan intoleransi dan radikalisme guru. Aspek demografis yang dilihat dalam survei PPIIM 2018 ini adalah jenis kelamin, sekolah versus madrasah, negeri versus swasta, mata pelajaran yang diampu guru, penghasilan, jenjang pendidikan, dan usia guru. Berikut ini temuan-temuannya:

- Guru perempuan ( $M=46,53$ ) memiliki opini intoleran yang lebih tinggi pada pemeluk agama lain dibandingkan dengan guru laki-laki ( $48,05$ ).
- Guru perempuan ( $M=48,08$ ;  $M=50,08$ ) memiliki opini dan intensi-aksi radikal yang lebih tinggi dibandingkan guru laki-laki ( $M=55,1$ ;  $M=56,3$ )
- Guru madrasah ( $M=44,66$ ) lebih intoleran pada pemeluk agama lain dibandingkan guru sekolah ( $M=47,79$ ).
- Perbedaan signifikan hanya terjadi pada opini toleransi eksternal ( $t=4.030$ ,  $p= 0.000$ ), guru sekolah lebih toleran pada pemeluk agama lain dibandingkan guru madrasah.
- Bila didasarkan pada status guru negeri vs guru sekolah swasta, perbedaan signifikan terjadi pada opini dan intensi-aksi toleransi pada pemeluk agama lain ( $t=2.043$ ,  $p=0.041$ ;  $t=2.954$ ,  $p=0.003$ ) serta radikalisme ( $t=2.150$ ,  $p=0.032$ ;  $t= 2.855$ , $p=0.004$ ) Guru sekolah/madrasah swasta lebih intoleran dibandingkan guru sekolah/ madrasah negeri. Guru sekolah/madrasah swasta lebih radikal dibandingkan guru sekolah/madrasah negeri.
- Perbedaan signifikan hanya terjadi pada toleransi pada pemeluk agama lain, opini radikal ( $F=2.494$ ,  $p=0.008$ ) dan Intensi Aksi Radikal ( $F=3.701$ ,  $p=0.000$ ) bila didasarkan pada mata pelajaran yang diampu. Bila dilihat dari mean, hasilnya menunjukkan bahwa guru-guru mata pelajaran Bahasa (Arab,

Indonesia dan Inggris), Olahraga & Kesenian, Bahasa Daerah, memiliki intoleransi, opini dan intensi-aksi radikal yang lebih tinggi dibandingkan guru mata pelajaran lainnya.

- Semakin rendah penghasilan semakin tinggi opini ( $F=3,390$ ,  $p=0,009$ ) dan intensi-aksi radikal ( $F=10,481$ ,  $p=0,000$ ).
- Guru TK/RA memiliki opini intoleran ( $F=4,339$ ;  $p=0,005$ ) terhadap pemeluk agama lain yang lebih tinggi dibandingkan guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- Semakin tinggi usia guru semakin tinggi opini toleransi eksternalnya, makin rendah opini dan intensi aksi radikalnya ( $M=40,55$ ;  $F=20,037$ ;  $p=0,000$ ;  $R^2=9\%$ )

### 3. Ormas dan Sumber Pengetahuan Keislaman

Bagaimana dengan peran Ormas Islam terhadap intoleransi dan radikalisme guru? Studi Infied (2016) tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia (Penelitian di 4 daerah: Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang). Temuannya: pertarungan pengaruh antara Ormas Islam ikut berperan menghasilkan kecenderungan konservatif dan gejala intoleran bahkan radikalisme (Kasus, Tasikmalaya). Hasil survey PPIM 2018 menunjukkan bahwa

1. Guru merasa paling dekat dengan lima organisasi masyarakat Islam berikut: NU, Muhammadiyah, Nahdhatul Wathan, Majelis Tafsir AlQuran dan Front Pembela Islam.
2. Hanya 33,65% Guru sangat aktif/aktif. Sisanya 66,35% guru tidak aktif/sangat tidak aktif dalam ormas keislaman.

Ada pengaruh kedekatan dengan Ormas Keislaman terhadap toleransi eksternal ( $F=2,001$ ,  $p=0,007$ ;  $F=2,240$ ,  $p=0,002$ ) baik opininya maupun intensi aksinya.

Pengalamannya aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga berpengaruh pada opini dan intensi radikal guru ( $F=4,458$ ,  $p=0,000$ ;  $F=4,778$ ,  $p=0,000$ ).

3. Ada pengaruh kedekatan guru dengan Ormas Keislaman terhadap opini dan intensi-aksi intoleran.

Ada pengaruh pengalaman guru aktif dalam organisasi kemahasiswaan terhadap toleransi eksternal (( $F=2.353$ ,  $p=0.016$ ;  $F=2.252$ ,  $p=0.021$ ) baik opininya maupun intensi aksinya.

Pengalamannya aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga berpengaruh pada opini dan intensi radikal guru ( $F=2.385$ ,  $p=0.015$ ;  $F=3.012$ ,  $p=0.002$ ).

Ustadz yang dijadikan panutan oleh guru adalah Ustadz Abdus Shomad (29.31%), Aa' Gym (11.63%), Mama Dedeh (9.66%), Prof. Dr. Quraish Shihab (5.41%), Ustadz Adi Hidayat (3.58%), Ustadz Maulana (3.46%), dan KH. Mustofa Bisri (2.91%)

Ada pengaruh tokoh panutan agama terhadap toleransi pada pemeluk agama lain ( $F=3.572$ ,  $p=0.000$ ;  $F=2.451$ ,  $p=0.000$ ), radikalisme ( $F=5.210$ ,  $p=0.000$ ;  $F=5.149$ ,  $p=0.000$ ) baik pada level opininya maupun intensi aksinya.

## REKOMENDASI

Hasil survei menunjukkan bahwa penghasilan guru berkorelasi dengan kecenderungan intoleransi dan radikalisme. Untuk itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pengambil kebijakan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini adalah dengan membuat standar pembayaran minimal guru yang lebih baik, tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta.

Pendidikan di TK/RA penting dalam penanaman nilai-nilai dasar siswa, yang mana siswa TK berada dalam masa penting penanaman nilai untuk masa depannya. Hasil survei ini menunjukkan bahwa guru TK/RA memiliki opini intoleran dan radikal dibandingkan guru level pendidikan lainnya. Betapa pun begitu, penting untuk meningkatkan pengalaman guru TK dalam situasi keberagaman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa guru perempuan lebih intoleran dibandingkan laki-laki. Ini sedikit banyak berkaitan dengan tren majelis taklim perempuan yang cenderung meningkat dan seringkali menjadi "sasaran" dakwah kelompok-kelompok intoleran/eksklusif. Untuk itu,

perhatian terhadap guru perempuan dalam kaitannya dengan penyebaran Islamisme harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh.

Guru madrasah memiliki opini yang cenderung lebih intoleran pada pemeluk agama lain dibandingkan guru sekolah. Betapa pun hal ini bisa dipahami karena sifat pendidikan madrasah yang homogen, namun berbagai program yang memberikan kesempatan kepada guru madrasah untuk meningkatkan pengalaman kemajemukan perlu dilakukan.

Untuk itu, perlu berbagai program yang memberikan kesempatan pada guru madrasah untuk mendapat pengalaman dalam lingkungan yang majemuk dan beragam, meningkatkan religious literasi pada guru madrasah agar lebih mengenal agama dan kelompok yang berbeda.

Salah satu cara yang efektif untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan kemajemukan para guru baik yang mengabdikan di sekolah/madrasah negeri maupun swasta adalah pemberdayaan lembaga-lembaga yang memproduksi guru, seperti LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) harus menjadi prioritas utama sebagai bagian dari upaya pencegahan meluasnya paham intoleran dan eksklusif. Hal yang sama juga harus dilakukan pada lembaga Pendidikan Profesi Guru (PPG), Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) yang menjadi garda depan yang menciptakan "pelita" yang mampu menerangi jalan peserta didik dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara.



## I. LATAR BELAKANG

Akhir-akhir ini beberapa peristiwa sosial keagamaan di Indonesia yang menyangkut radikalisme, intoleransi, dan terorisme menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 13-14 Mei 2018, rangkaian pengeboman di tiga rumah ibadah umat Kristen terjadi di Surabaya. Serangan teroris yang diklaim dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah –yang merupakan cabang ISIS di Asia Tenggara –ini menewaskan setidaknya 28 orang dan korban luka sebanyak 57 orang. Kemudian diikuti oleh peristiwa pawai siswa Taman Kanak-Kanak (TK) di Probolinggo yang mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan cadar. Tidak sampai di sana, siswa-siswa tersebut juga membawa replika senjata api. Ironisnya pawai tersebut dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, ekspresi konservatisme Islam juga mengemuka dalam wajah intoleransi. Peristiwa penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atas dasar agama dan etnis yang diikuti oleh aksi demonstrasi besar “Aksi Belas Islam 411 dan 212” menambah daftar kasus intoleransi di Indonesia. Peristiwa itu bukanlah satu-satunya. Berdasarkan data Setara Institut (2018), antara tahun 2007 sampai 2017 terdapat total 5,215 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di seluruh wilayah di Indonesia. Artinya setiap tahun rata-rata terdapat 472 kasus.

Dari rangkaian peristiwa-peristiwa sosial keagamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa radikalisme, intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Hal itu menimbulkan kembali pertanyaan tentang seberapa jauh komitmen umat Islam terhadap negara bangsa Indonesia dan demokrasi, serta bagaimana sebenarnya bentuk budaya politik umat Islam Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya tidaklah baru, namun dengan peristiwa-peristiwa di atas maka ia kembali menjadi relevan. Karena pada dasarnya dalam konsep negara bangsa modern dan sistem demokrasi, semua warga negara mendapat hak yang sama di dalam urusan-urusan publik, dan toleransi menjadi aspek yang tidak terpisahkan.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan agama melekat pada sistem pendidikan negara, maka mengkaji

pendidikan Islam dalam konteks radikalisme dan intoleransi menjadi kontekstual. Memahami pandangan guru terhadap isu-isu terkait Islam, kebangsaan dan demokrasi menjadi fokus pada studi ini. Dari sini kita bisa memahami komitmen guru terhadap negara bangsa Indonesia dan demokrasi, sejauh mana penerimaan mereka, serta bagaimana sebenarnya model budaya politik guru Muslim. Studi ini juga mengkontekstualisasikan antara pandangan guru tersebut dengan masalah-masalah sosial keagamaan yang terjadi belakangan di Indonesia.

### **Masuknya Radikalisme ke “Ruang Guru”**

Guru merupakan salah satu instrumen vital dalam pendidikan. Di Indonesia, guru sejatinya bukan hanya sebagai corong penyalur ilmu, namun mereka juga dinilai menjadi standar nilai perilaku. Misalnya, seorang anak akan dicap apakah dia berperilaku terpuji atau tercela dilihat dari kepatuhannya terhadap guru. Begitu pun bagi para guru, mereka dituntut untuk berperilaku sesuai dengan standar nilai yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ini, guru bukan hanya tenaga profesional sebagai pengajar, namun mereka juga memiliki otoritas tradisional yang memiliki pengaruh dalam masyarakat Indonesia.

Di dalam dunia yang serba canggih dan instan, pengetahuan dapat dengan mudah didapat. Internet mempunyai porsi yang besar dalam mengisi pengetahuan peserta didik dan guru di sekolah. Tentu saja, informasi yang mereka dapat bisa informasi yang negatif maupun pengetahuan yang positif. Ditambah hilangnya batas-batas teritorial dalam dunia maya yang memungkinkan mereka mendapat informasi yang berbahaya dari kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang bertentangan bagi kemanusiaan. Misalnya narasi-narasi yang menganjurkan dan menjustifikasi penggunaan kekerasan dalam beragama.

Salah satu informasi yang mudah didapatkan dalam dunia digital adalah menyangkut masalah agama. Perlu diakui sebelumnya bahwa internet juga memiliki sisi positif di mana informasi dan ilmu pengetahuan dengan mudah dan masif bisa didapatkan. Namun, di sisi lain dunia maya juga menjadi alat kalangan tertentu dalam mempropagandakan gagasan-gagasan mereka yang inklusif, radikal, dan intoleran tentang agama. Sebagai contoh, beberapa situs online menyajikan narasi untuk mengganti dasar negara

Indonesia (NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 ) dan sistem demokrasi dengan sistem khilafah. Sebuah sistem teokratis –kedaulatan di tangan Tuhan, bukan pada rakyat–yang menerapkan syariat Islam secara menyuruh. Lebih jauh, internet juga digunakan oleh kalangan teroris dalam menyebarkan ideologi mereka dan merekrut anggota.

Apa yang terjadi di arena maya sejatinya tidaklah jauh berbeda dengan yang terjadi di dalam dunia nyata. Gerakan-gerakan yang menghendaki penggantian sistem negara Indonesia menjadi khilafah juga menguat pasca Reformasi. Mereka mencoba menjustifikasi ideologi mereka di tengah kondisi perekonomian negara yang kurang stabil. Mereka membangun opini bahwa umat non-Muslim diuntungkan dalam proses pembangunan ekonomi dalam upaya membangun bingkai (*framing*) perasaan diberlakukan tidak adil (*feeling injustice*) dan selalu dirugikan dalam kebijakan-kebijakan negara. Narasi seperti ini yang pada akhirnya menjadi framing sebagai justifikasi untuk mengganti sistem negara bangsa dan demokrasi. Sistem pemerintahan Islam (khilafah) ditawarkan oleh gerakan-gerakan tersebut sebagai alternatif solusi satu-satunya atas kondisi ketidakadilan dan keterbelakangan ekonomi umat Islam.

Pemahaman yang demikian pada akhirnya akan melahirkan sikap dan intoleransi terhadap non-Muslim karena dianggap sebagai ancaman dan penyebab masalah umat Islam. Atau setidaknya akan menimbulkan sikap dan tuntutan bagi Muslim sebagai mayoritas untuk diperlakukan lebih khusus oleh negara ketimbang umat agama yang lain. Salah satu ekspresi nyata dari sikap keberagamaan demikian adalah suburnya gerakan-gerakan yang menghendaki penerapan syariat Islam akhir-akhir ini. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan peraturan-peraturan yang bernuansa agama lahir di era demokrasi ini. Gerakan-gerakan itu juga kerap menggunakan kekerasan dalam menyebarkan ide-ide mereka. Kasus-kasus diskriminasi terhadap minoritas juga menjadi anomali dari demokrasi Indonesia saat ini.

Demokrasi sejatinya memperbolehkan setiap warga negara untuk menyampaikan ide-ide mereka dengan bebas. Bahkan demokrasi juga memberi peluang bagi warga negara untuk menolak demokrasi itu sendiri dengan cara-cara yang damai. Namun, jika ide-ide yang diekspresikan dibarengi dengan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, di sinilah hukum berlaku untuk melarang pelakunya. Maka

menjadi tugas bagi pihak-pihak yang sadar akan hakikat berdemokrasi untuk mengonter ide-ide kalangan radikal yang ingin mengganti negara bangsa Indonesia dan sistem demokrasi.

Di sinilah peran guru dibutuhkan untuk menangkal ide-ide yang ingin mengganti sistem negara dan menjustifikasi kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstremis. Guru yang memiliki pandangan keagamaan yang moderat, toleran, dan memiliki wawasan kebangsaan dan demokrasi yang kuatlah yang dibutuhkan untuk mengonter gagasan-gagasan yang intoleran dan radikal, khususnya kepada generasi muda. Mengingat saat ini gerakan dan ide-ide intoleran dan radikal sudah masuk ke dalam institusi pendidikan di Indonesia.

Studi-studi terbaru mengenai menguatnya eksklusivisme dan intoleransi di sekolah menguatkan pentingnya penelitian ini. Eksklusivisme dan intoleransi di sekolah masuk melalui berbagai celah. Setidaknya paham tersebut masuk ke sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, buku ajar Pendidikan Agama Islam, dan guru agama. Namun faktor eksternal seperti keterlibatan siswa di dalam gerakan radikal di luar sekolah dan pengaruh radikalisme di dunia maya, khususnya internet dan sosial media, juga berpengaruh terhadap pembentukan pemahaman keagamaan yang demikian.

Infiltrasi radikalisme di sekolah masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (Ciciek, 2008; Salim HS, Kailani, & Azekiyah, 2011).<sup>1</sup> Memperkuat temuan itu, Masooda Bano, Didin Syafruddin, dan kawan-kawan (2016) menyatakan radikalisme juga masuk ke sekolah melalui ustaz atau alumni yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan radikal tertentu. Namun perlu dicatat, meskipun radikalisme di sekolah

---

<sup>1</sup> Lihat juga hasil Survey yang dilakukan Wahid Institute pada 2016. Studi ini menemukan: [1] Pandangan dan sikap terkait *jinayah* dan politik Islam: 78% (1.268 siswa) mendukung ide khilafah; 62% (281 siswa) mendukung orang yang berzina harus dirajam 58% (944 siswa); mendukung hukuman potong tangan bagi pencuri; 33% (529 siswa) mengartikan jihad sebagai perang melawan orang kafir; 17% (281 siswa) setuju orang murtad harus dibunuh. [2] Peta dukungan terhadap pelaku dan aksi terorisme: 33% (541 siswa) meyakini Amrozi, Imam Samudra, Abu Bakar Baasyir, Bahrin Naim, dan Oman Abdurrahman, adalah contoh muslim yang mempraktekan jihad sejati; 37% (609 siswa) meyakini Osama bin Laden mati syahid; 10% (163 siswa) mendukung serangan bom di Sarinah; 6% (96 siswa) mendukung ISIS.

masuk melalui kegiatan Rohis, tidak semua organisasi Rohis mempromosikan pandangan keagamaan yang radikal. Beberapa di antara aktifis Rohis memiliki pandangan keagamaan yang moderat.

Paham eksklusivisme dan intoleran juga masuk melalui buku-buku ajar Pendidikan Agama Islam yang diproduksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Nasuhi, Makruf, Umam, & Darmadi (edt.), 2018). Paham-paham tersebut terdapat di dalam buku ajar mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas. Misalnya terdapat materi yang mengajarkan boleh membunuh orang kafir dan musyrik; juga menyesatkan beberapa praktik ibadah seperti ziarah dan tahlil. Bahkan, buku-buku untuk siswa tingkat TK juga tidak luput dari konten-konten yang berisi kekerasan seperti terdapat kata-kata dalam buku ajar misalnya: bom, setelah raih bunuh kiayi,

Dari studi-studi yang telah dipaparkan di atas, maka kita dapat berkesimpulan bahwa radikalisme menjadi ancaman bagi dunia pendidikan di Indonesia. Radikalisme dan intoleransi telah merasuk dari berbagai celah dalam sistem pendidikan, mulai dari: buku ajar PAI, guru agama Islam, guru mata pelajaran lainnya dan kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa studi juga memperlihatkan bagaimana guru mata pelajaran umum juga berkontribusi dalam membentuk pandangan keagamaan siswa (Saputra, 2018). Sudah barang tentu, guru bukan satu-satunya pihak di sekolah yang berperan dalam mengonter atau menyemai paham radikal dan intoleran di sekolah. Untuk itu, studi yang komprehensif memetakan pandangan keagamaan guru menjadi krusial. Apalagi di tengah meningkatnya konservatisme agama dan gerakan-gerakan radikal di dalam dunia pendidikan Indonesia (Afrianty, 2012; Bryner, 2013; Makruf, 2014; Tan, 2014).

Selain itu, hasil survei PPIM 2017 hasil survei nasional PPIM 2017 tentang "Sikap Keberagaman Gen Z di Sekolah dan Universitas "Api dalam Sekam" di Indonesia" (PPIM, 2017) menunjukkan bahwa siswa SMA/K/MA menunjukkan opini intoleransi dan opini radikal yang tinggi. Selain itu, guru memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat intoleransi siswa. Selain dengan guru agama, siswa mendiskusikan masalah keagamaan dengan guru mata pelajaran lainnya (PPIM, 2017). Riset kualitatif yang dibukukan dalam "Menjaga benteng Kebhinnekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon (Maarif Institute, 2017) juga menunjukkan temuan serupa,

dimana guru dan kepala sekolah adalah aktor-aktor penting dalam konteks ini. Selain itu, fenomena maraknya kecenderungan intoleran dan radikalisme agama tidak hanya terjadi pada siswa sekolah menengah, namun juga terjadi pada level pendidikan paling dini sekalipun (Miris Tepuk Anak Saleh, 2018; Dita Siska, 2017; Saya ingin ISIS di seluruh dunia, 2018). Kecenderungan ekspresi keagamaan ini sudah tampak sejak level pendidikan awal seperti Taman kanak-kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA). Untuk itulah survei PPIM 2018 memfokuskan pada guru dari berbagai level pendidikan, yaitu dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/K/MA serta yang mengampu pada semua mata pelajaran. Fenomena ekspresi keagamaan di masyarakat dan hasil survei PPIM 2017 cukup mengejutkan dan sekaligus memberikan alarm bagi kita semua, bahwa guru sebagai “Pelita itu Meredup.”

**Rumusan Masalah.** Survei ini akan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar intoleransi guru sekolah/madrasah di Indonesia?
2. Seberapa besar radikalisme (dukungan terhadap Negara Islam) guru sekolah/madrasah di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang berkontribusi terhadap intoleransi dan radikalisme guru?

## II FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI

### Fokus Kajian

Ada tiga konsep dasar yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu religious intolerance, radikalisme dan pandangan Islamis. Berikut ini akan dipaparkan masing-masing konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

*Religious intolerance* didefinisikan sebagai ketidaksediaan untuk mempersilakan pemeluk agama lain mengekspresikan ide/kepentingan yang berbeda (Sullivan et al. 1982).

Konsep radikalisasi yang digunakan dalam survei ini mengacu pada adopsi pandangan kelompok ekstremis untuk memengaruhi perubahan sosial atau politik (Mohammed Hafez, 2015); serta menggunakan cara yang menolak prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai tujuan politik (O' Ashour, 2009).

Pada survei ini digunakan Two Pyramid Model Theory (Mc Cauley & Moskalenko, 2017), yang menyatakan bahwa radikalasi bisa berada dalam tahapan opini dan juga tahapan aksi. Namun demikian, tidak semua opini radikal akan menghasilkan aksi radikal.

Dalam survei ini, konsep pandangan Islamis mengacu pada pandangan Islam absolut, yang cenderung bersifat tertutup, *inward looking*, dan eksklusif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang diidentifikasi sebagai “bukan bersifat/bersumber Islam” (Harris, 2008 dan Ruthven 2004)

### **Metode Penelitian**

Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian survei dengan tujuan memperoleh gambaran tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel/ccontoh yang dipilih dari anggota populasi tersebut. Penelitian dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data dikumpulkan di setiap provinsi dengan mengambil sejumlah sampel kabupaten/kota. Banyaknya kabupaten/kota yang diambil sebagai sampel proporsional terhadap jumlah guru yang ada di tiap kabupaten/kota di suatu provinsi. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 6 Agustus - 6 September 2018 secara serentak di seluruh wilayah yang disurvei.

Populasi target/sasaran pada penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah dan guru muslim aktif dengan masa kerja minimal 1 tahun pada jenjang sekolah berikut:

- a) Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)
- b) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MA)
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- d) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)/Madrasah Aliyah (MA).

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) yang diakses tanggal 3 – 17 Juli 2018, masing-masing terdapat 3.056.648 sekolah dan 776.903 madrasah, sehingga secara total terdapat sebanyak 3.833.551 sekolah/madrasah. Tabel berikut menyajikan banyaknya guru yang menjadi target populasi menurut jenjang sekolah dan instansi pembina.

Table 2.1. Banyaknya Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Instansi Pembina Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
<b>A. Kemendikbud</b>		
1	Taman Kanak-kanak (TK)	329.102
2	Sekolah Dasar (SD)	1.480.453
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	635.972
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	611.121
<b>Jumlah A</b>		<b>3.056.648</b>
<b>B. Kemenag</b>		
1	Raudhatul Athfal (RA)	118.196
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	269.460
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	265.784
4	Madrasah Aliyah (MA)	123.463
<b>Jumlah B</b>		<b>776.903</b>
<b>Jumlah A+B</b>		<b>3.833.551</b>

Sumber:

A. <http://referensi.kemdikbud.go.id/> (diakses 17 Juni 2018)

B. [www.emispendis.kemenag.go.id](http://www.emispendis.kemenag.go.id) (diakses 12 Juni 2018)

### **Sampel dan Margin of Error**

Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi keberagaman guru di sekolah/madrasah secara nasional. Untuk itu penentuan ukuran sampel juga harus memperhitungkan tingkat ketelitian yang baik. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara total sebanyak 2300 orang guru termasuk kepala sekolah, yang dialokasikan secara proporsional ke setiap jenjang sekolah. Berikut alokasi sampel pada setiap jenjang sekolah/madrasah beserta *Margin of Error* (MoE) yang dihitung pada tingkat kepercayaan 95% dan diasumsikan proporsi guru yang toleran/tidak toleran sebesar 0,5, adalah 2,07%

Metode penarikan sampel yaitu *Multistage Sampling (Three Stage Stratified Sampling)* dengan strata kabupaten dan kota. Dalam menjamin kualitas data, penelitian ini melakukan mekanisme *spot check* sebanyak 5% dari sampel. Mekanisme secara teknis adalah jika sampel di sebuah kabupaten/kota sebanyak 1-4 sekolah, maka *spot check* dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan survei di satu sekolah yang terkena sampel. Jika sampel sekolah sebanyak 5-10 dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 sekolah yang terkena sampel. Terakhir jika sampel dalam satu kabupaten/lebih dari 10 kota, maka *spot check* dilakukan di 3 sekolah sampel.

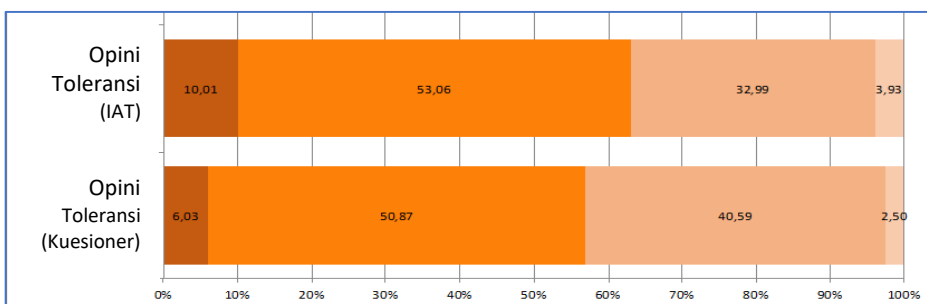


Dua variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat keberagaman adalah intoleransi dan radikalisme yang dibatasi pada dukungan terhadap Negara Islam. Kedua variabel tersebut diukur baik pada level opini maupun intensi aksinya. Jadi, yang diukur adalah opini intoleransi, intensi aksi intoleran, opini tentang dukungan terhadap negara Islam serta Intensi aksi dalam mendukung negara Islam. Skor intoleransi diklasifikasikan berdasarkan kategori: sangat intoleran, intoleran, toleran, dan sangat toleran. Sedangkan skor radikalisme dalam mendukung negara Islam diklasifikasikan dengan kategori: sangat radikal, radikal, moderat, dan sangat moderat.

### III LEVEL INTOLERANSI DAN RADIKALISME DALAM Mendukung Negara Islam pada Guru Muslim

Studi ini mengkonfirmasi bahwa ada penguatan opini intoleran dan radikal (dukungan terhadap negara Islam) di kalangan guru Muslim di sekolah/madrasah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mereka memiliki opini yang masuk dalam kategori intoleran/sangat intoleran dan radikal/sangat radikal. Namun jika dilihat dari sisi intensi aksi/tindakan, mereka sebagian besar memiliki kecenderungan toleran dan moderat (Gambar 1). Walaupun secara intensi aksi/tindakan mereka cenderung moderat dan toleran, tapi kecenderungan opini mereka yang sebagian besar radikal dan intoleran sangat mengkhawatirkan, karena opini yang demikian berpotensi menjadi tindakan radikal.

**Intoleransi Guru.** Berikut ini visualisasi dalam bentuk grafik intoleransi guru:



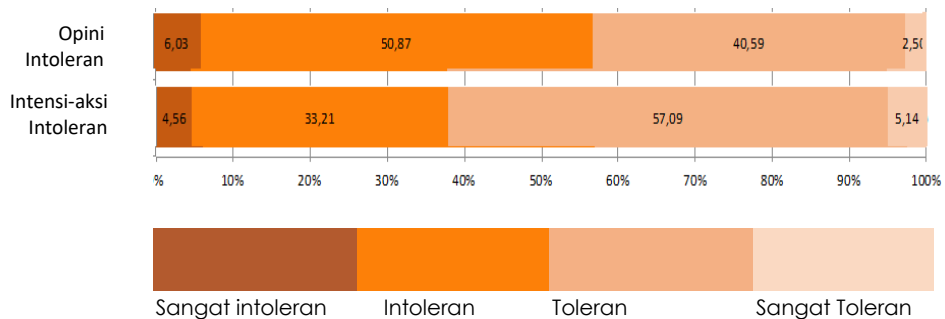


Gambar 3.1. Perbandingan Pesentasi Opini Intoleran Guru

Hasil opini intoleransi pada pemeluk agama lain ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruknya. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah “Non-Muslim boleh mendirikan rumah ibadah mereka di lingkungan Ibu/Bapak tinggal” dan “Tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan (misal: Kebaktian pada pemeluk Kristen, atau Mesodan bagi pemeluk Hindu) di kediaman mereka.” Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur opini intoleransi pada pemeluk agama lain. Berikut ini persentase jawaban setuju pada contoh pernyataan opini toleran:

- Sebanyak 56% guru tidak setuju bahwa Non-Muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar Ibu/Bapak tinggal.
- Sebanyak 21% guru tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan (misal: Kebaktian pada pemeluk Kristen, atau Mesodan bagi pemeluk Hindu) di kediaman mereka

Selain opini intoleran, survei ini juga melihat intensi-aksi intoleran guru. Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3.2. Persentasi Opini vs Intensi Aksi Intoleransi Guru

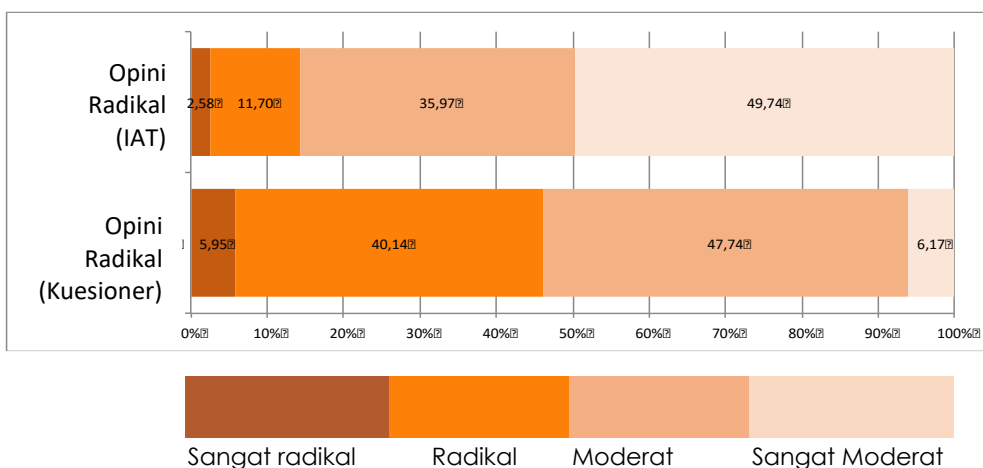
Intensi-aksi intoleran pada pemeluk agama lain ini diukur dengan menggunakan 5 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruknya. Instruksi yang diberikan adalah: Bila ada kesempatan, maka apakah

guru sangat tidak ingin melakukan s.d. sangat ingin melakukan tindakan yang ada dalam pernyataan yang diberikan. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah “Menandatangani petisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama” dan “Menandatangani petisi menolak pendirian sekolah berbasis agama non-Islam di sekitar tempat tinggalnya.” Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur intensi-aksi intoleransi pada pemeluk agama lain.

Pada intensi aksi intoleran, temuan survei ini menunjukkan bahwa **bila ada kesempatan:**

- 29% Guru berkeinginan untuk menandatangani petisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama.
- 34% Guru berkeinginan untuk menandatangani petisi menolak pendirian sekolah berbasis agama non-Islam di sekitar tempat tinggalnya.

**Radikalisme Guru.** Bila dilihat skor opini radikal guru baik dari alat ukur implisit (IAT) maupun alat ukur eksplisit (kuesioner), hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan alat ukur implisit (IAT), sebesar 14,28% guru memiliki opini yang sangat radikal dan radikal dalam hal mendukung Negara Islam. Sedangkan dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang eksplisit, guru memiliki opini yang sangat radikal dan radikal sebesar 46,09%. Visualisasi dalam bentuk tabel untuk hasil di atas adalah sebagai berikut:



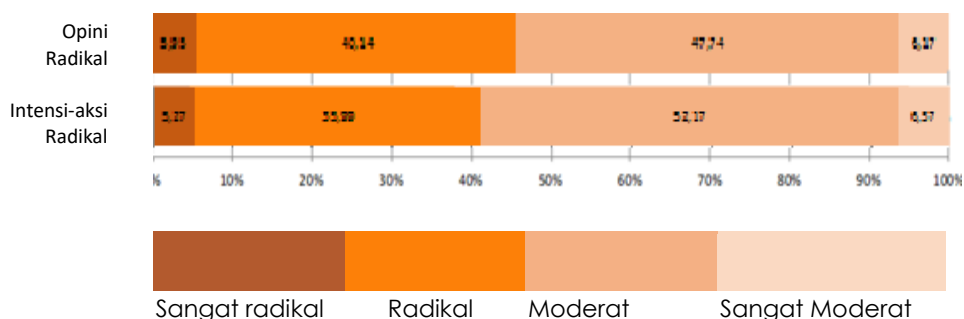
Gambar 3.3. Perbandingan Pesentasi Opini Radikal (Dukungan Negara Islam) Guru di Indonesia

Hasil opini radikal guru dalam konteks dukungan pada Negara Islam ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruksinya. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah “menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam” dan “ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irak dalam memperjuangkan berdirinya negara Islam.” Kedua contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur opini radikal guru.

Dalam hal opini radikal dan intensi-aksi radikal, hasil survei ini menunjukkan bahwa

- 33% Guru setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam
- 29% Guru setuju untuk ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irak dalam memperjuangkan berdirinya negara Islam.

Selain opini radikal, survei ini juga melihat intensi-aksi radikal guru. Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3.4. Persentasi Opini vs Intensi Aksi Radikal Guru

Intensi-aksi radikal guru ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang sudah diuji validitas konstruksinya. Instruksi yang diberikan adalah: Bila ada kesempatan, maka apakah guru sangat tidak ingin melakukan s.d. sangat ingin melakukan tindakan yang ada dalam pernyataan yang diberikan. Adapun 2 contoh pernyataan tersebut adalah “menganjurkan orang lain agar ikut berperang dalam mewujudkan negara Islam.” dan “menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara Islam.” Kedua

contoh pernyataan ini adalah yang memiliki muatan faktor tinggi dalam mengukur intensi-aksi radikal. Berikut ini hasil persentase jawaban guru dalam merespon pernyataan tersebut.

Seandainya memiliki kesempatan:

- 27.59% Guru berkeinginan untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang dalam mewujudkan negara Islam.
- 13.30% Guru berkeinginan untuk menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara Islam.

### **Faktor Pendorong Radikalisme dan Intoleransi**

Ada 3 faktor penting yang mendorong tingkat intoleransi dan radikalisme guru, yaitu: 1] Pandangan Islam eksklusif, 2] faktor demografi, dan 3] sumber pengetahuan agama dan ormas keagamaan. Berikut ini penjelasan ketiga faktor tersebut.

## **IV. PANDANGAN KE-ISLAMAN**

Di sebagian dunia Islam, termasuk di Indonesia, menguatnya religiusitas dan identitas politik Islam ini pada umumnya berjalan seiring dengan kecenderungan pada konservatisme yang juga semakin berkembang. Sejumlah pihak menilai apa yang mereka gambarkan sebagai arus naik Islamisme yang konservatif dan bahkan sebagian diantaranya cenderung puritan ini, penting untuk dicermati. Pada ranah politik di Indonesia saat ini, menguatnya Islamisme ditandai antara lain dengan tumbuhnya partai-partai politik Islam dan usaha terus menerus untuk memformalisasi ajaran Islam dalam kehidupan bernegara, baik pada level nasional maupun lokal. Bagi sejumlah pihak, proses Islamisasi yang berjalan ini dinilai sebagai perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Sebab, pada saat yang bersamaan, kecenderungan kepada intoleransi, radikalisme, dan kekerasan, juga semakin meningkat. Banyak data yang menunjukkan serangan dan kekerasan yang menimpa minoritas dari tahun ke tahun masih terus terjadi. Belum lagi dengan banyaknya aksi

teror yang melibatkan sejumlah kelompok-kelompok Islam militan sepanjang masa pasca reformasi.

Berdasarkan alasan-alasan semacam itu sebagian kalangan menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai fenomena kebangkitan Islam dan Islamisme tidak lebih serta tidak kurang adalah sebagai saudara kembar dari ekstrimisme dan radikalisme. Perbedaannya hanya tampak pada sisi cangkang atau tampilan luarnya saja. Meskipun, beberapa ahli lainnya melihat ada segi-segi yang positif, terutama berkaitan dengan keterlibatan sejumlah kelompok Islamis dalam proses demokrasi.

Bassam Tibi (2012) menilai bahwa kemunculan kembali kelompok-kelompok islamis dalam beberapa waktu terakhir yang mengusung ide-ide konservatif dan "supremasi Islam" perlu dilihat lebih sebagai kecenderungan yang membahayakan dari pada memberikan harapan. Tibi dengan tegas meragukan komitmen kaum Islamis terhadap demokrasi serta tujuan-tujuan politik ketika melibatkan diri dalam proses demokrasi. Ia juga menyatakan bahwa walaupun mereka menunjukkan peberubahan dalam cara-cara meraih kekuasaan, bukan berarti tujuannya dan nilai-nilai yang diusungnya juga ikut berubah. Islamisme tetap saja merupakan sebuah ideologi atau keyakinan yang menghendaki terwujudnya kekuasaan berdasarkan Islam yang berwujud kekhilafahan dan sejenisnya. Syariah Islam menjadi rujukan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bernegara.

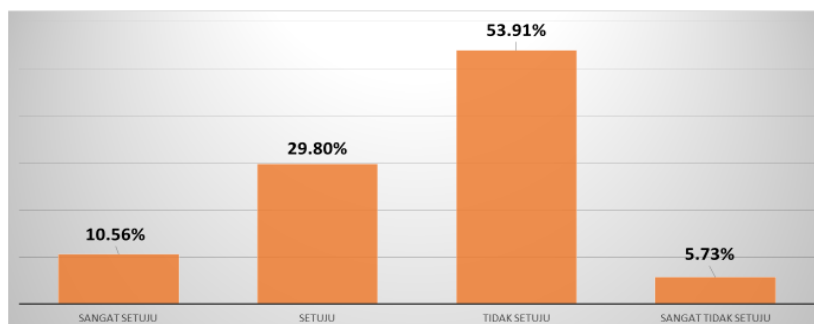
Bagi kebanyakan Islamis hanya ada satu jenis kekuasaan dimuka bumi ini yang punya legitimasi atau absah, yakni negara berdasarkan Islam. Mereka menuntut supaya syariat Islam diberlakukan dalam kehidupan bernegara. Sebagian besar kaum Islamis melihat pembentukan sebuah pemerintahan Islam sebagai keharusan karena institusi itulah yang dapat memberikan jaminan bagi berlakunya Islam secara menyeluruh. Jadi berlakunya syariah saja, atau Islam yang sekedar bersifat komplementer, dalam pandangan mereka belum mencukupi.

### **Sumber Pengetahuan dan Klaim Kebenaran (*Truth Claim*)**

Fundamentalisme keagamaan salah satunya dicirikan dengan cara pandang yang bersifat absolut terhadap doktrin keagamaan (Harris, 2008 dan Ruthven 2004). Kitab suci seringkali dipahami tidak sekadar sebagai tuntunan dalam ritual keagamaan maupun hubungan-hubungan sosial keagamaan, tetapi juga sebagai sumber kebenaran dalam semua hal termasuk dalam ilmu pengetahuan. Karena pandangannya yang demikian, para

penganutnya cenderung bersifat tertutup, *inward looking*, dan eksklusif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang diidentifikasi sebagai “bukan bersifat/ bersumber Islam”.

Seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat



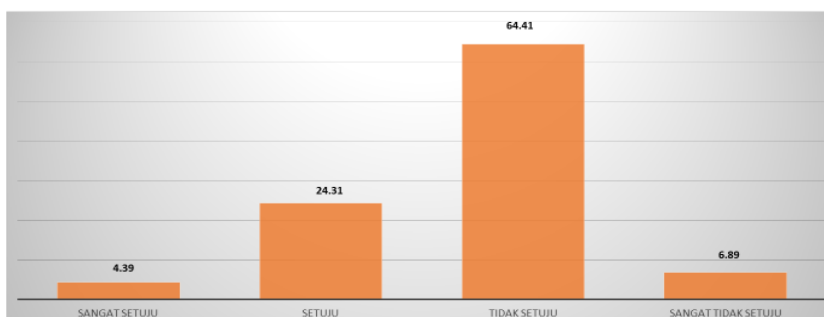
Gambar 4.1. Islamisme dalam Belajar Pengetahuan

Data nasional diatas memperlihatkan responden yang setuju bahwa umat Islam tidak perlu lagi mempelajari sumber-sumber pengetahuan dari Barat karena telah cukup dengan pengetahuan yang ada dalam al Qur'an mencapai 40.36%. Paling banyak 51.41% berasal dari responden guru TK/RA memiliki keyakinan demikian, disusul kemudian guru SD/MI 41,71%. Sedangkan responden guru SMP/MTS dan SMA/MA jumlahnya hampir sama, yakni 35.54% dan 36.66 %. Secara umum presentase ini cukup besar. Pandangan responden ini dapat ditafsirkan sebagai keyakinan mereka tentang Islam yang absolut. Sebab, Islam dipahami sebagai “paling sempurna dan mencakup semuanya” sehingga harus menjadi satu-satunya sumber rujukan dalam memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pengetahuan. Konsekuensinya, muslim karena telah memiliki kitab suci yang sempurna tidak lagi memerlukan rujukan pengetahuan lain termasuk berbagai inovasi yang dianggapnya bukan bersumber dari ajaran Islam.

Pemikiran keagamaan yang absolutis dan merasa paling benar ini membawa dampak rendahnya penerimaan terhadap pendapat-pendapat lain yang berbeda, baik berlaku terhadap pihak luar (*external*) maupun dalam sesama umat Islam sendiri. Pendapat responden tentang perbedaan pendapat dalam

memahami persoalan agama dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Perbedaan menafsirkan dalam Islam adalah sesuatu yang buruk



#### 4.2. Pendapat tentang perbedaan penafsiran dalam Islam

Sebanyak 28.70 % responden guru-guru menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa perbedaan pendapat dalam menafsirkan Islam adalah hal yang buruk, serta karena itu harus dihindari. Memang sebagian besar menyatakan tidak setuju 71.30%, tetapi angka yang setuju jumlahnya lebih dari seperempat dari semua responden menunjukkan jumlah yang signifikan dan perlu diwaspadai. Menolak perbedaan pendapat pada umumnya didasari oleh klaim kebenaran atau *truth claim* yang bersifat sepihak, padahal dalam realitas keberagaman umat Islam terdapat berbagai aliran dan faham keagamaan. Bagaimanapun intoleransi dan persekusi sering bermula dari klaim-klaim kebenaran sepihak yang kemudian berujung pada tuduhan bahwa mereka yang berbeda pemahaman keagamaan sebagai salah dan bahkan sesat. Persekusi yang dialami oleh antara lain minoritas muslim seperti Syi'ah, Ahmadiyah dan lainnya pada prinsipnya didasari oleh keyakinan "paling benar" dan perasaan "paling islam" sejumlah pelakunya.

Persoalan menjadi semakin krusial pada saat pemahaman keberagaman yang absolutis ini dibawa keranah kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Yang muncul kemudian adalah pandangan ekstrim bahwa hanya agamalah (dalam hal ini Islam) yang mampu menjadi solusi atau jawaban masalah-masalah kemanusiaan. Sebanyak 82.77 % data nasional guru-guru menyatakan setuju bahwa Islam merupakan satu-satunya solusi mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Pandangan ini dapat diartikan sebagai



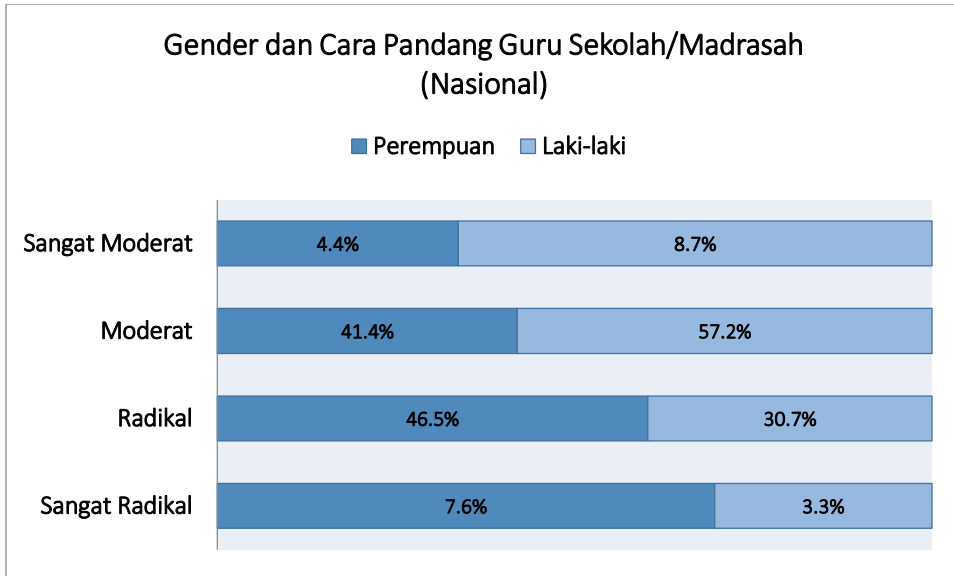
menegasikan adanya sumber-sumber maupun pendekatan lain (ilmu pengetahuan umum, teknologi, sistem sosial dan budaya dan sebagainya) yang dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah. Sehingga semua akar persoalan akan ditarik jalan keluarnya hanya melalui jendela agama. Jargon "Islam atau shari'ah adalah solusi" yang sering diusung kelompok Islamis Hizb Tahrir tampaknya cukup merefleksikan cara pandang seperti itu.

## V. FAKTOR DEMOGRAFI

**Gender.** Jika melihat data berdasarkan gender, dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, didapatkan bahwa guru perempuan, baik pada sekolah di bawah Kemendikbud dan madrasah di bawah Kemenag, yang memiliki cara pandang/opini radikal lebih banyak (54,1%) dibandingkan dengan guru laki-laki (34,0%).

Tabel 5.1 Opini Radikal Guru di Indonesia Berdasarkan Gender

TINGKAT	JK	OPINI RADIKAL (%)				Total	p
		Sangat Radikal	Radikal	Moderat	Sangat Moderat		
Nasional	P	7,6	46,5	41,4	4,4	59,8	<0,01
	L	3,3	30,7	57,2	8,7	49,2	
	Tot	5,9	40,2	47,8	6,1	100	
Kemenag	P	8,8	46,8	39,8	4,6	50,9	
	L	3,8	29,8	58,2	8,2	49,1	
	Tot	6,4	38,4	48,8	6,4	100	
Kemendikbud	P	7,4	46,5	41,7	4,4	61,9	
	L	3,2	31,0	57,0	8,8	38,9	
	Tot	5,8	40,6	47,5	6,1	100	

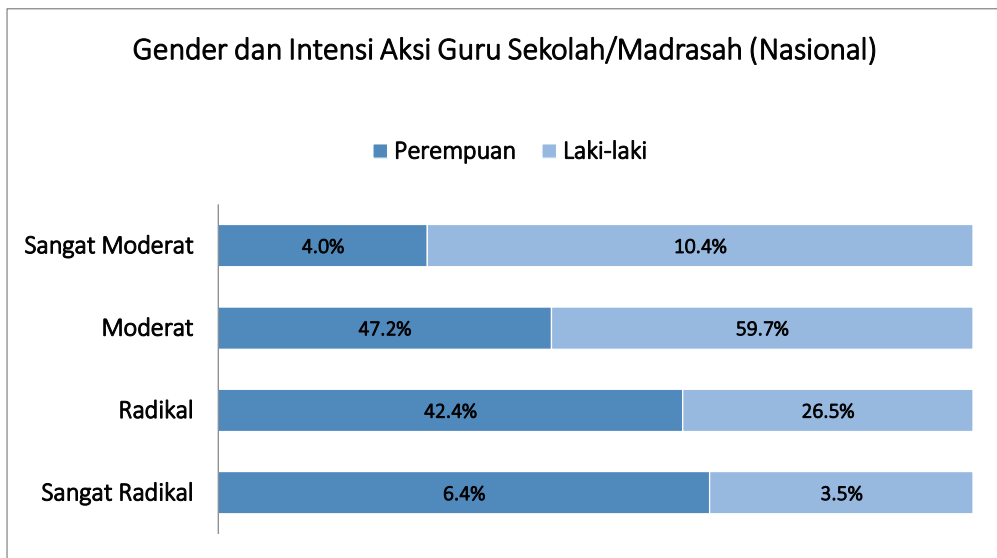


Gambar 5.1 Opini Radikal Guru di Indonesia berdasarkan Gender

Sejalan dengan cara pandang tersebut, prosentasi guru perempuan sekolah dan madrasah (48,8%) dengan dengan intensi atau keinginan untuk melakukan aksi radikal lebih banyak dari pada guru laki-laki (30,0%). Dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.2.

Tabel 5.2. Intensi Aksi Radikal Guru di Indonesia berdasarkan Gender

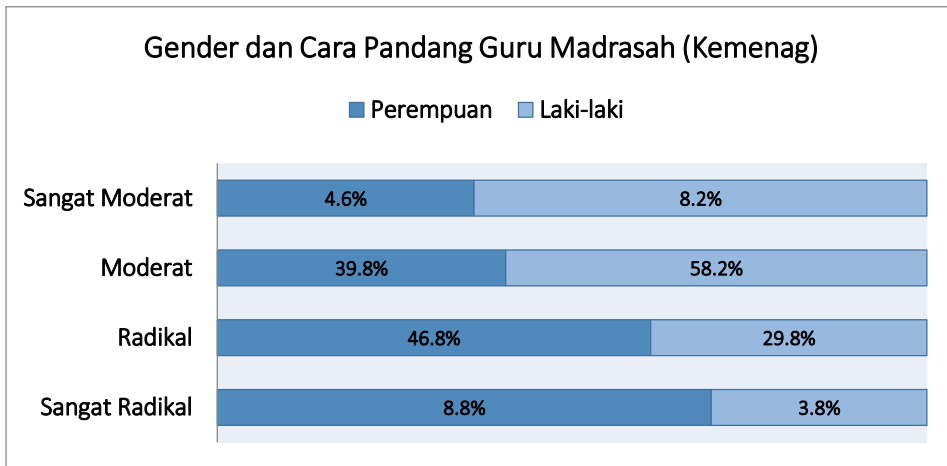
TINGKAT	JK	INTENSI AKSI RADIKAL (%)				Total	p
		Sangat Radikal	Radikal	Moderat	Sangat Moderat		
Nasional	P	6,4	42,4	47,2	4,0	59,8	<0,01
	L	3,5	26,5	59,7	10,4	49,2	
	Tot	5,2	36,0	52,2	6,5	100	
Kemenag	P	9,3	43,5	42,1	5,1	50,9	
	L	5,3	23,1	62,5	9,1	49,1	
	Tot	7,3	33,5	52,1	7,1	100	
Kemendikbud	P	5,9	42,2	48,2	3,8	61,9	
	L	2,9	27,5	58,8	10,7	38,9	
	Tot	4,8	36,6	52,2	6,4	100	



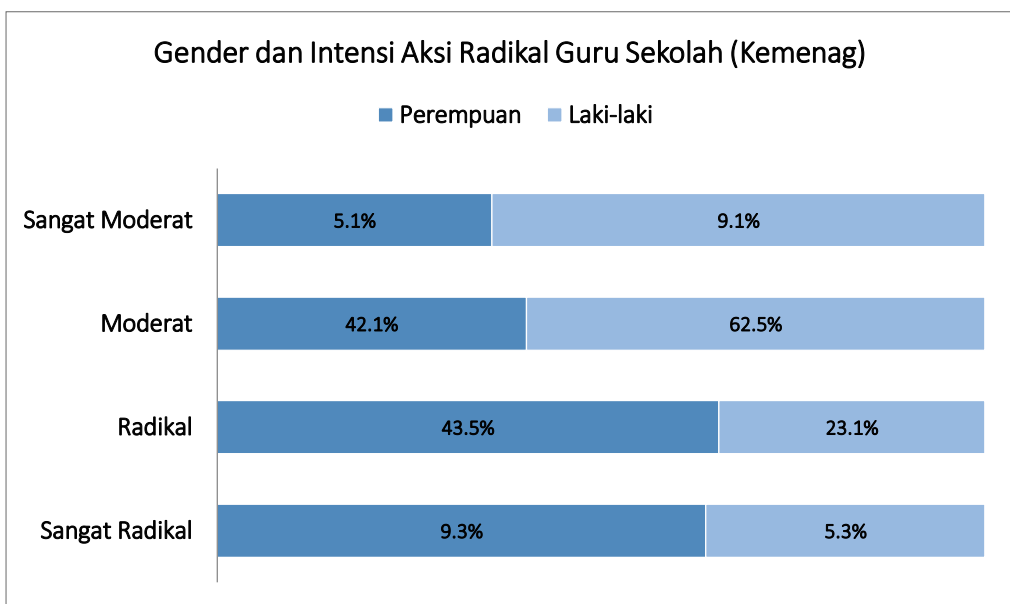
Gambar 5.2. Intensi Aksi Radikal Guru berdasarkan Gender

Jika dipisahkan antara guru sekolah dan guru madrasah, pola yang sama ditemukan. Guru madrasah perempuan seperti tergambar pada Gambar 1.3 lebih banyak yang memiliki cara pandang yang radikal (55,6%) bahkan 8,8% di dalamnya termasuk yang sangat radikal. Jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan guru madrasah laki-laki, yaitu 33,6% dari mereka memiliki cara pandang radikal.

Untuk intensi aksinya dalam melakukan tindakan radikal seperti pada Gambar 1.4. sejalan dengan opini namun dengan prosentase sedikit dibawahnya. Guru madrasah perempuan lebih banyak memiliki intensi aksi radikal (52,8%) jika dibandingkan pada guru madrasah laki-laki (28,4%).



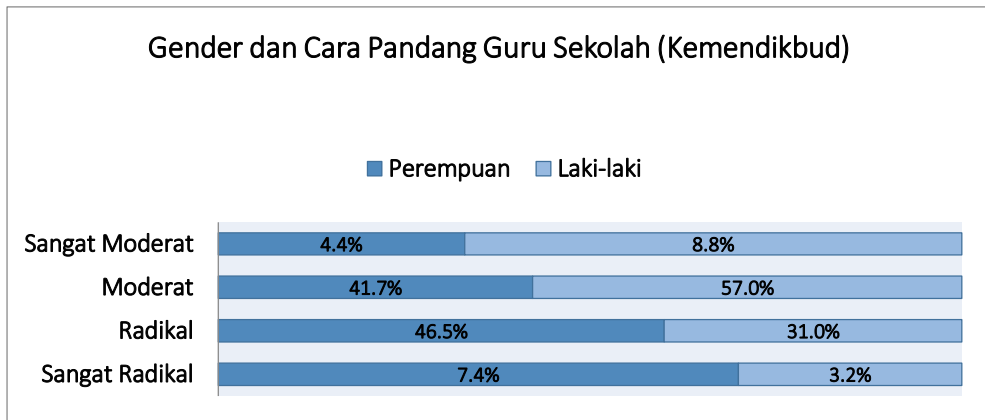
Gambar 5.3. Opini Radikal Guru Madrasah berdasarkan Gender.



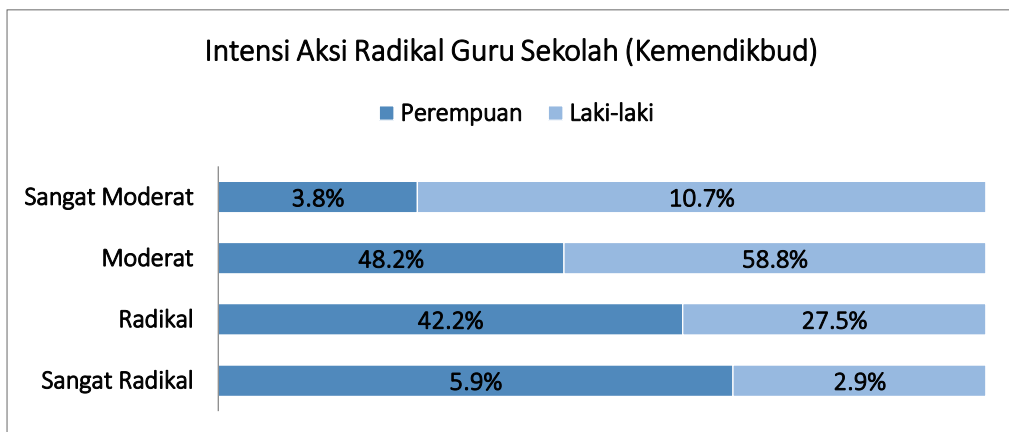
Gambar 5.4. Intensi Aksi Radikal Guru Madrasah di Indonesia berdasarkan Gender

Gambar 5.3 dan 5.4 menunjukkan pola yang sama kembali dilihat jika meneropong populasi para guru sekolah yang berada dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Guru-guru sekolah perempuan secara signifikan lebih banyak yang memiliki cara

pandangan radikal (53,9%) jika dibandingkan dengan guru laki-laki (34,2%). Sejalan dengan opini, jumlah guru sekolah perempuan yang memiliki intensi aksi radikal juga lebih banyak (48,1%) dari pada guru laki-laki (30,4%).



Gambar 5.5. Cara Pandang/Opini Radikal Guru Sekolah di Indonesia berdasarkan Gender



Gambar 5.6. Intensi Aksi Guru Sekolah di Indonesia berdasarkan Gender

Secara garis besar, terdapat hubungan yang signifikan antara gender terhadap pola pikir dan intensi aksi radikal. Guru perempuan baik yang mengajar di sekolah umum dibawah kemendikbud maupun di madrasah dibawah kemenag, lebih banyak yang memiliki pola pikir dan intensi aksi radikal jika dibandingkan dengan guru laki-laki. Secara nasional pun jumlah guru perempuan lebih banyak dari pada guru laki-laki, dan peran guru dan ibu dalam hal ini perempuan

sebagai pendidik tentunya sangat krusial. Oleh karena itu, perlu atensi dan pendekatan lebih terhadap temuan ini.

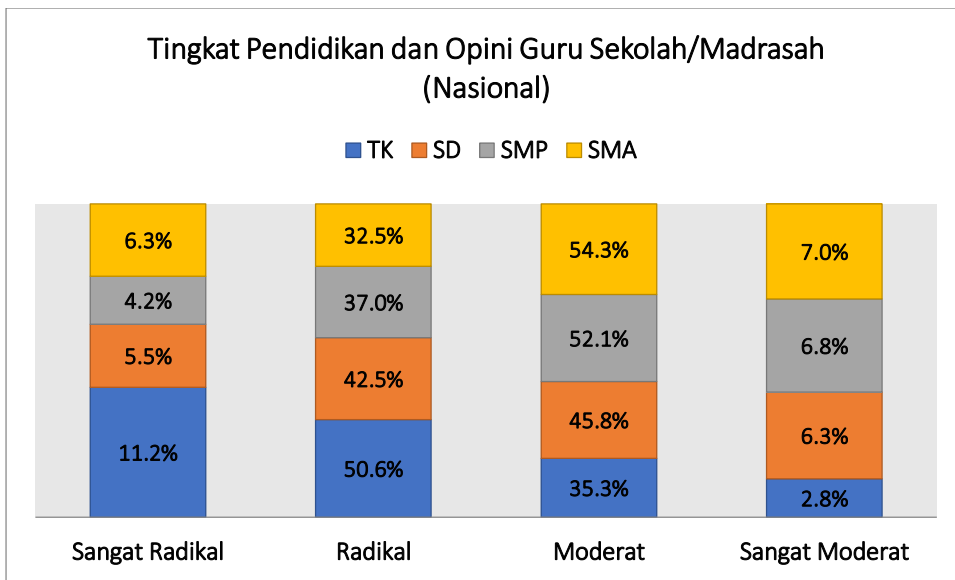
### Tingkat Satuan Pendidikan dan Potensi Radikalisme

Berdasarkan tingkat satuan pendidikan, yaitu TK/RA, SD/MI, SMP/MTs., dan SMA/SMK/MA, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin moderat guru-guru yang mengajarnya. Hasil bermakna secara statistik terdapat pada guru tingkat nasional dan guru-guru sekolah di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud). Oleh karena itu, target perhatian kepada guru-guru pada tingkat satuan pendidikan dini, yaitu TK dan SD, sangat penting ditekankan.

Gambaran data survei dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Gambar 2.1. yang menunjukkan secara nasional, bahwa guru-guru di Indonesia pada tingkat TK/RA, 61,8% memiliki cara pandang yang radikal, diikuti oleh guru-guru pada tingkat SD/MI sebanyak 58,0%, SMP/MTs. Sebanyak 41,2%, dan SMA/SMK/MA terkecil yaitu 38,8%.

Tabel 5.3. Opini Radikal Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Satuan Pendidikan

TINGKAT	Satuan Pendidikan	OPINI RADIKAL (%)				Total	p-value
		Sangat Radikal	Radikal	Moderat	Sangat Moderat		
Nasional	TK/RA	11,2	50,6	35,3	2,8	11,1	p<0,01
	SD/MI	5,5	52,5	45,8	6,3	45,9	
	SMP/MTs.	4,2	37,0	52,1	6,8	23,7	
	SMA/SMK/MA	6,3	32,5	54,3	7,0	19,3	
	Total	5,9	40,1	47,7	6,2	100	
Kemenag	RA	11,9	50,8	32,2	5,1	13,8	p>0,05
	MI	4,6	35,8	51,0	8,6	35,4	
	MTs.	5,8	37,7	51,3	5,2	36,2	
	MA	6,5	35,5	51,6	6,5	14,6	
	Total	6,3	38,5	48,6	6,6	100	
Kemendikbud	TK	11,1	50,5	36,3	2,1	10,5	p<0,01
	SD	5,6	43,6	44,9	5,9	48,4	
	SMP	3,5	36,7	52,4	7,4	20,8	
	SMA/SMK/MA	6,2	32,0	54,7	7,0	20,4	
	Total	5,9	40,5	47,5	6,1	100	

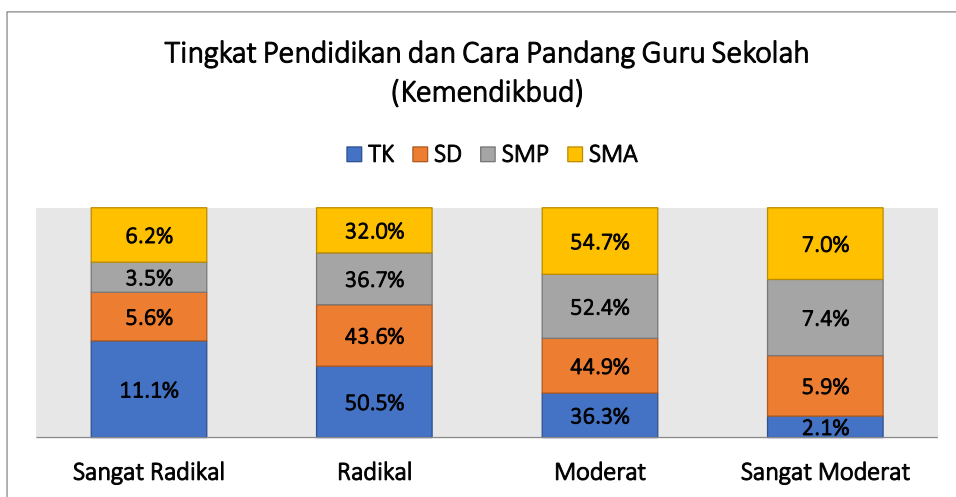


Gambar 5.7. Opini Radikal Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Satuan Pendidikan

Ketika populasi guru dikelompokkan berdasarkan kementerian yang menaunginya, didapatkan seperti terlihat pada Tabel 5.3. dan Gambar 5.7. bahwa guru dibawah kemendikbud memiliki pola yang sama dengan data nasional. Guru-guru yang mengajar pada tingkat pendidikan dini dibawah kemendikbud secara signifikan memiliki cara pandang yang lebih radikal. Semakin rendah tingkat pendidikan semakin radikal cara pandang gurunya. Data menunjukkan, 61,8% guru TK memiliki cara pandang radikal, diikuti oleh guru SD (48%); SMP (41,2%); dan terendah pada guru SMA 38,8%.

Sedangkan untuk guru-guru madrasah dibawah naungan Kemenag, didapatkan bahwa guru-guru madrasah ditingkat Raudhatul Athfal (RA) paling banyak yang memiliki cara pandang radikal, yaitu 62,1%. RA merupakan setingkat dengan TK. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), masing-masing memiliki 40,4%; 43,5% dan 41,0% guru yang memiliki cara pandang radikal. Besaran yang kurang lebih sama pada ketiga tingkat pendidikan ini. Walaupun, data pada guru kemenag ini secara statistik tidak signifikan ( $p > 0,05$ ), namun secara garis besar dapat dilihat bahwa sebagian besar, lebih dari setengah dari populasi guru-guru pada pendidikan dini seperti TK dan RA memiliki cara pandang yang radikal. Untuk tingkat pendidikan lain, walau guru dengan pemikiran moderat lebih banyak, namun

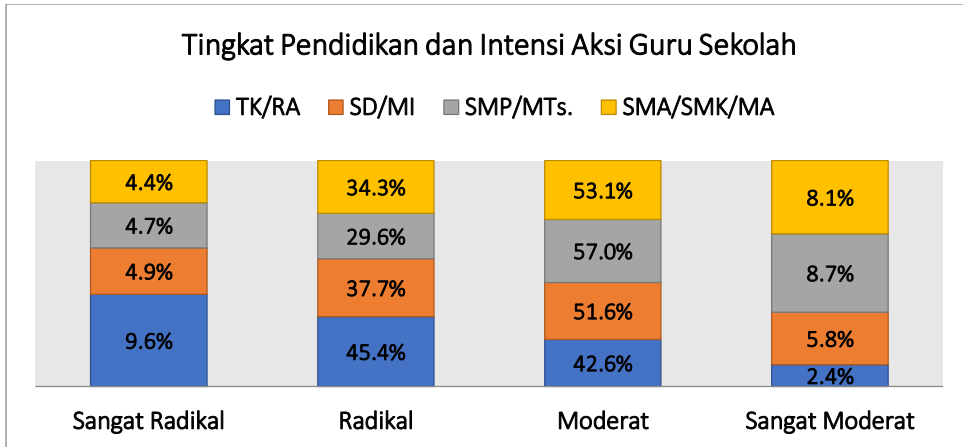
prosentasi guru dengan pemikiran radikal masih cukup tinggi, yaitu masih lebih dari sepertiga dari populasi guru.



Gambar 5.8. Opini Radikal Guru Sekolah (Kemendikbud) berdasarkan Satuan Pendidikan

Pada umumnya cara pandang diikuti oleh keinginan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Pada survei ini juga diukur keinginan atau intensi para guru untuk melakukan aksi-aksi radikal. Dimana, ditemukan bahwa data nasional yang didapat sejalan dengan pola dari data opini atau cara pandangnya. Pada Tabel 2.2. dan Gambar 2.3. tergambar bahwa guru pada tingkat pendidikan dini yaitu, TK/RA dan SD/MI di Indonesia secara nasional memiliki intensi atau keinginan untuk melakukan tindakan radikal paling banyak yaitu 55% dan 42,6%, dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, SMP/MTs. (34,3%) dan SMA/MA (38,7%).

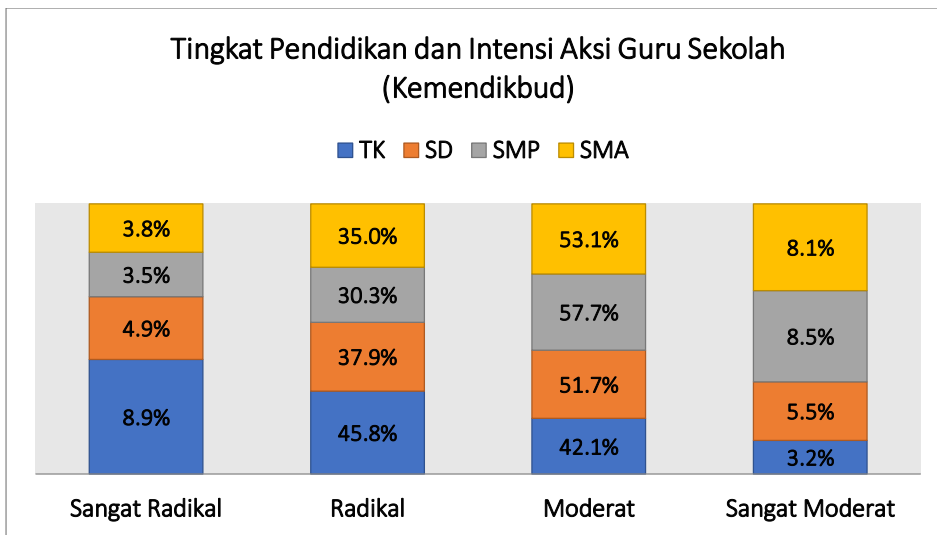




Gambar 5.9. Intensi Aksi Radikal Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia berdasarkan Satuan Pendidikan

Pola yang sama ditemukan saat populasi dari guru dipisahkan berdasarkan naungan kementerian, yaitu kemendikbud dan kemenag. Pada Gambar 5.9. tergambar bahwa guru pada tingkat pendidikan TK hampir lebih dari setengahnya memiliki keinginan untuk melakukan aksi radikal, yaitu 54,7%. Jumlah yang cukup banyak secara signifikan juga ditemukan pada guru tingkat SD (42,8%) dan SMA (41,4%). Sementara itu, untuk SMP hanya 33,8% guru yang memiliki intensi untuk melakukan aksi radikal. Jumlah ini pun masih cukup besar.

Sedangkan pada guru madrasah, didapatkan data bahwa guru-guru dibawah kemenag juga memiliki intensi atau keinginan untuk melakukan aksi radikal terutama pada guru madrasah pendidikan awal, yaitu RA dan MI. RA sepertinya halnya terdeteksi memiliki opini radikal terbanyak, begitu juga pada intensi aksinya, sebanyak 56% guru madrasah RA memiliki intensi aksi radikal. Sedangkan untuk MI sebanyak 41%. Guru-guru madrasah dengan intensi aksi lebih moderat ditemukan pada guru madrasah MTs. dan MA. Didapatkan bahwa 35,7% dari guru MTs. dan 38,8% dari guru MA yang memiliki keinginan untuk melakukan aksi radikal. Namun, data pada populasi guru dibawah kemenag ini secara statistik tidak signifikan.



Gambar 5.10. Intensi Aksi Radikal Guru Sekolah (Kemendikbud) berdasarkan Satuan Pendidikan

### Profil Guru dan Potensi Radikalisme

Seperti yang dijelaskan pada metodologi, survei ini melibatkan guru-guru baik di Sekolah dan Madrasah, yang dipilih secara random disetiap sekolah. Oleh karena itu, guru-guru ini memiliki latar belakang pengampu mata pelajaran yang beragam. Pada data ini dikelompokkan menjadi guru mata pelajaran: bahasa; matematika dan IPA (MIPA); Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan sejarah; Pendidikan Agama Islam (PAI) dan budi pekerti; kesenian dan keterampilan; bimbingan dan konseling; guru kelas; kepala sekolah, dimana mereka tidak mengajar; sedangkan diluar itu dikelompokkan menjadi mata pelajaran lainnya. Responden terbanyak yang terjaring pada survei ini adalah guru kelas sebanyak 28,2%. Guru kelas ini umumnya mengajar pada tingkat SD/MI kelas 1, 2, dan 3, mereka mengajar hampir seluruh pelajaran pada anak didik. Kedua terbanyak merupakan guru PAI dan budi pekerti sebanyak 19,6%, diikuti oleh guru mata pelajaran bahasa (14,1%) dan MIPA (13,4%). Populasi sampel dibawah 10% seperti terlihat pada Tabel 3.1. adalah kepala sekolah (9,2%); guru kesenian dan ketrampilan (6,9%); guru IPS dan sejarah (6,5%); dan guru BK (bimbingan dan konseling) sebanyak 1,7%. Hanya 0,4% populasi dikelompokkan pada mata pelajaran lainnya tidak termasuk yang

tersebut diatas. Perbedaan signifikan hanya terjadi pada toleransi pada pemeluk agama lain, opini radikal ( $F=2.494$ ,  $p=0.008$ ) dan Intensi Aksi Radikal ( $F=3.701$ ,  $p=0.000$ ) bila didasarkan pada mata pelajaran yang diampu. Bila dilihat dari mean, hasilnya menunjukkan bahwa guru-guru mata pelajaran Bahasa (Arab, Indonesia dan Inggris), Olahraga & Kesenian, Bahasa Daerah, memiliki intoleransi, opini dan intensi-aksi radikal yang lebih tinggi dibandingkan guru mata pelajaran lainnya.

Jika populasi guru dikelompokkan berdasarkan induk kementerian yang menaungi guru-guru tersebut, didapatkan pola yang kurang lebih sama. Pada guru-guru madrasah dibawah kemenag, lebih dari setengah dari populasi guru-guru kesenian dan keterampilan (52,1%); MIPA (51,1%); guru kelas (50,9%); bahkan 66,6% guru BK masih berpandangan radikal. Sedangkan, guru-guru mata pelajaran lainnya lebih banyak yang berpandangan moderat namun tetap masih tinggi yang berpandangan radikal yaitu, 47,2% guru bahasa dan 40,6% guru PAI. Pada kepala sekolah madrasah, didapatkan bahwa sebagian besar memiliki pandangan yang moderat, sepertiga lebih dari populasi yang memiliki pandangan radikal (37,5%). Hal yang sama terjadi pada guru IPS dan sejarah, 30% yang berpandangan radikal. Walau data guru-guru madrasah dibawah kemenag ini belum signifikan secara statistik, namun merupakan gambaran situasi yang harus diperhatikan.

Sedangkan pada guru-guru sekolah dibawah naungan kemendikbud, kembali guru kesenian dan keterampilan dan guru kelas dideteksi lebih dari setengah dari populasinya (51,1% dan 50,3%) memiliki cara pandang yang radikal. Cara pandang radikal yang tinggi juga dideteksi pada guru bahasa (51,3%); guru PAI (48,6%); kepala sekolah (42,4%); dan MIPA (40,2%). Hal yang sama pada guru madrasah, untuk guru mata pelajaran IPS dan sejarah di sekolah merupakan yang paling moderat, sepertiga dari populasi yang memiliki pandangan radikal, yaitu 29,3%. Dari keseluruhan guru sekolah, guru BK lah yang paling sedikit memiliki cara pandang radikal (25%). Data guru sekolah pada kemendikbud ini bermakna secara statistik.

### **Status Kepegawaian Guru dan Potensi Radikalisme**

Terdapat 4 macam status kepegawaian yang dapat disandang guru-guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru tetap non-PNS, guru tetap yayasan, dan guru tidak tetap atau honorer. Guru PNS, karena

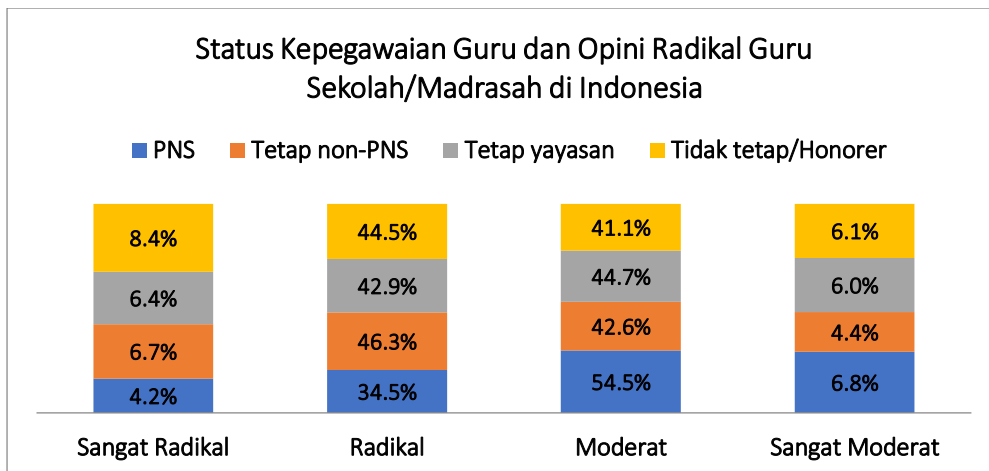
merupakan aparatur negara, tentunya memiliki status yang lebih jelas hirarkinya dan mapan daripada guru yang lainnya. Guru PNS di Indonesia bisa dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) jika merupakan guru tingkat sekolah umum dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD), TK, SMP, dan SMA. Guru juga bisa dibawah naungan kementerian agama (kemenag) jika merupakan guru madrasah baik dari tingkat RA sampai tingkat Madrasan Aliyah (MA).

Jika data survei, dianalisa berdasarkan status kepegawaian para guru. Hasil survei menunjukkan bahwa cara pandang dan intensi aksi sebagian besar guru PNS baik dibawah kementerian agama (kemenag) dan kemendikbud adalah yang paling moderat. Sedangkan untuk guru dengan status kepegawaian tetap non-PNS, tetap yayasan, dan honorer perlu diwaspadai karena lebih banyak yang memiliki cara pandang radikal.

Pada Gambar 5.1. dapat dilihat bahwa secara nasional guru dengan status kepegawaian PNS lebih moderat cara pandangnya (39% radikal) dibandingkan dengan guru dengan status kepegawaian tetap non-PNS (57,8% radikal); tetap yayasan (52,6% radikal); dan guru tidak tetap (51,1% radikal).

Pola yang sama didapatkan ketika hanya menganalisa guru yang hanya dibawah naungan kemenag. Guru PNS yang paling moderat cara pandangnya, 34,3% diantara mereka yang beropini radikal. Sedangkan stutus lainnya, yang paling radikal adalah guru tidak tetap/honorer (61,5%); guru tetap yayasan (43,8%); dan guru non-PNS (39,4%).

Namun, berbeda pola jika kita melihat guru di bawah naungan kemendikbud, justeru guru-guru dengan status PNS banyak yang memiliki opini/cara pandang radikal (54,7%) dibandingkan guru dengan status kepegawaian lainnya. Guru non-PNS yang beropini radikal sebanyak 42,8%; diikuti guru tidak tetap/honorer sebanyak 38,8%; dan guru tetap yayasan yaitu terendah 33,8%. Cara pandang ini perlu ditelisik lebih lanjut untuk dilihat penyebabnya dan dikonfirmasi dengan melihat intensi aksi dari para guru tersebut. Apakah cara pandang ini diikuti oleh keinginan untuk melakukan sesuatu yang radikal.

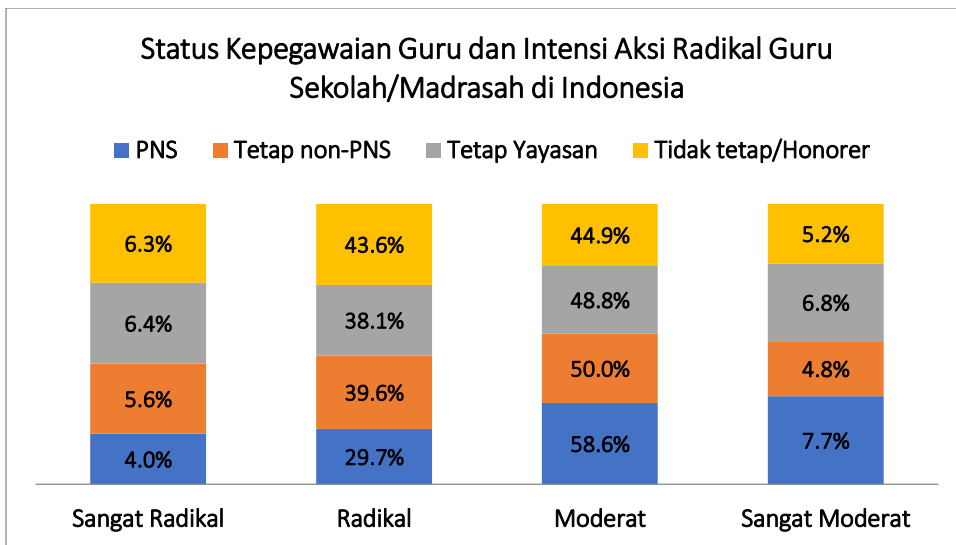


Gambar 5.11. Opini Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Status Kepegawaian Guru

Ketika melihat dari keinginan atau intensi untuk melakukan aksi atau tindakan radikal, data secara nasional mengkonfirmasi dari data opini diatas. Guru-guru dengan status PNS paling banyak yang moderat dalam intensi aksinya, terdapat 33,7% guru yang berintensi radikal. Hal ini dibandingkan dengan guru dengan status lainnya, PNS yang paling moderat. Guru tidak tetap yang memiliki intensi aksi yang radikal sebanyak 49,9%; diikuti guru tetap yayasan sebanyak 44,5%; dan guru non-PNS 45,2%.

Gambaran yang sama juga terlihat pada guru-guru di bawah kemenag. Sejalan dengan gambaran opininya, guru kemenag berstatus PNS adalah yang paling moderat dibandingkan dengan yang lainnya, 29,9% yang memiliki intensi aksi radikal. Sedangkan guru dengan status tidak tetap atau honorer adalah yang paling banyak memiliki intensi aksi radikal, yaitu 60,3%. Diikuti dengan guru tetap yayasan yaitu sebanyak 39,5% dan guru non-PNS 33,8% yang memiliki keinginan melakukan aksi radikal.

Hal yang menarik terjadi pada hasil analisis data mengenai intensi aksi pada guru-guru di bawah kemendikbud (Gambar 5.12.).



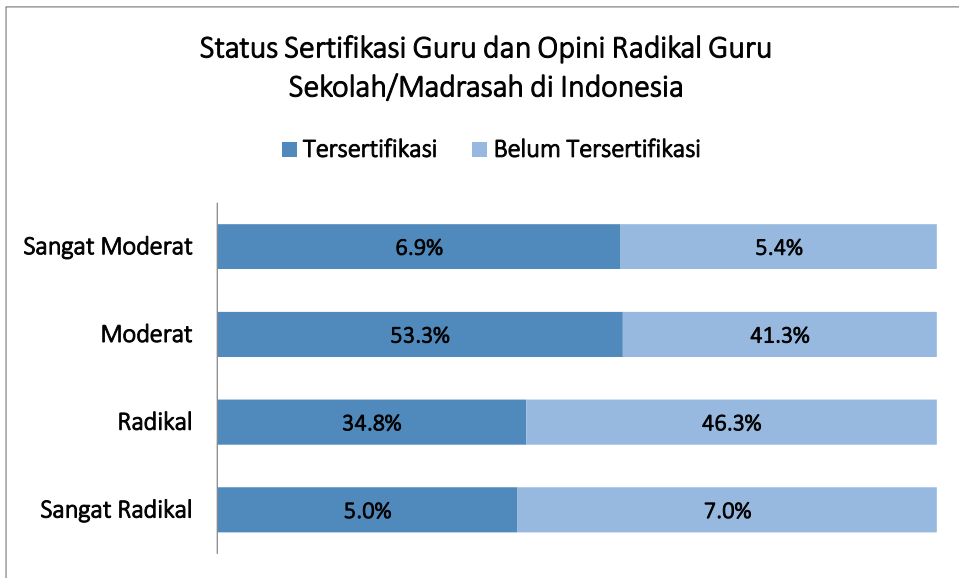
Gambar 5.12. Intensi Aksi Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Status Kepegawaian Guru

Walaupun pada sisi opini atau cara panjang guru dengan status PNS lebih radikal, namun pada intensi aksinya justru guru PNS kemendikbud yang paling moderat. Betapa pemikiran-pemikiran opini hanya berada pada level opini saja, berbeda pada keinginan ketika ingin melakukan sesuatu aksi. Sedangkan, data lain justru meningkat, pada tingkat opini tidak terlalu radikal namun intensi aksinya menjadi lebih radikal. Presentasi meningkat pada tingkat intensi aksi dibandingkan opininya, terjadi pada guru non-PNS (49,2% radikal); guru tetap yayasan (47,5% radikal); dan guru tidak tetap (47,8% radikal).

### **Sertifikasi Guru dan Potensi Radikalisme**

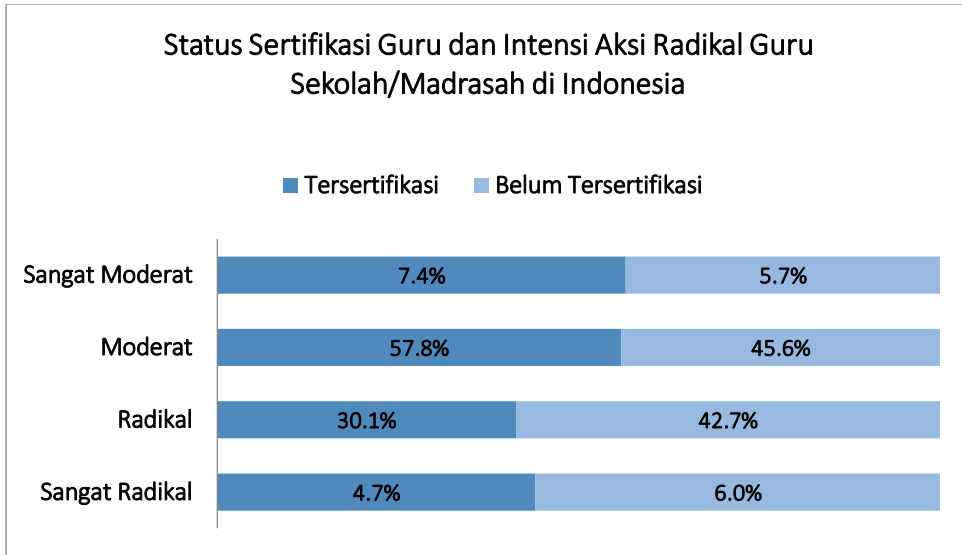
Tidak semua guru sudah tersertifikasi, selain berorientasi pada kompetensi, sertifikasi ini juga merupakan menjadi ukuran keamanan guru karena tersertifikasi berarti adanya tambahan tunjangan dari pemerintah.

Hasil survei menunjukkan secara nasional guru yang belum tersertifikasi memiliki cara pandang dan keinginan untuk bertindak radikal, dibandingkan dengan yang tersertifikasi. Pada gambar 5.2. dapat dilihat 53,3% guru yang tidak tersertifikasi memiliki cara pandang radikal dan 48,7% dari mereka memiliki keinginan atau intensi melakukan aksi radikal.



Gambar 5.13. Cara Pandang/Opini Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Status Sertifikasi Guru

Jika dianalisis berdasarkan kementerian, baik guru di bawah kemenag dan kemendikbud yang belum tersertifikasi lebih banyak yang radikal daripada yang sudah tersertifikasi baik secara opini dan intensi. Guru dibawah naungan kemenag sebanyak 49,5% memiliki opini radikal dan 46,1% diantaranya berintensi melakukan tindakan radikal juga. Sedangkan, guru-guru dibawah kemendikbud, 54,2% memiliki cara pandang radikal dan 49,4% nya ingin melakukan tindakan yang radikal.



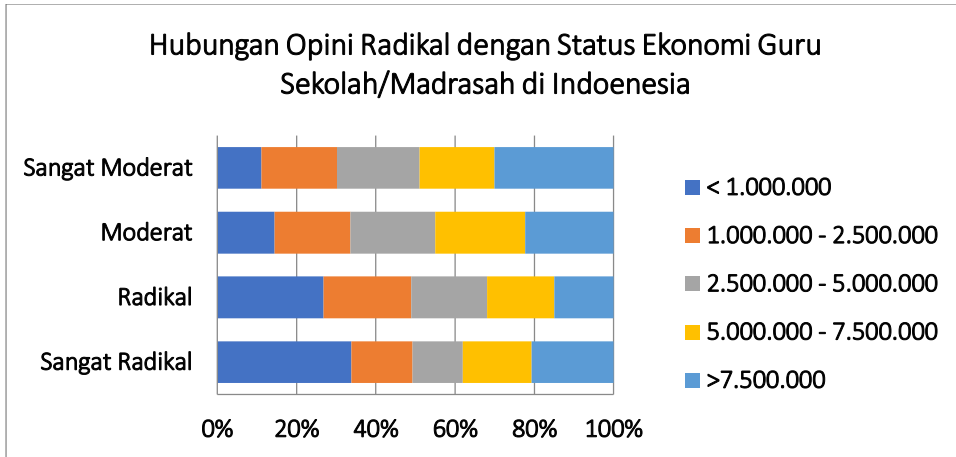
Gambar 5.14. Intensi Aksi Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Status Sertifikasi Guru

Ini semua sejalan dengan temuan bahwa tingkat ekonomi guru atau penghasilan guru mempengaruhi opini dan intensi aksi radikalnya.

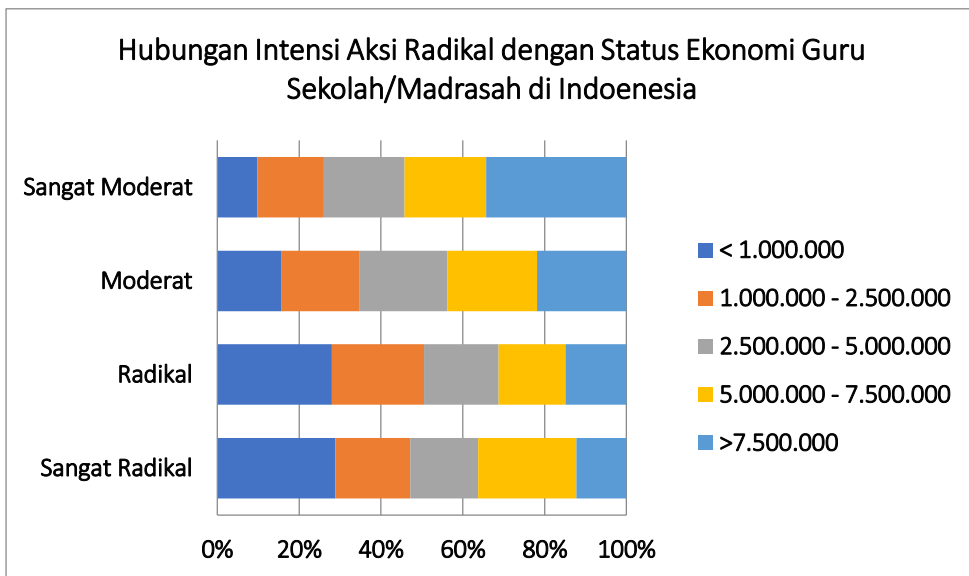
### **Penghasilan Guru dan Potensi Radikalisme**

Hasil survei menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan guru, semakin moderat guru tersebut. Guru dengan penghasilan dibawah satu juta rupiah per bulan, memiliki cara pandang dan intensi aksi radikal yang paling tinggi. Fenomena ini ditemukan pada data nasional, maupun pada guru tingkat kemenag dan kemendikbud. Faktor ekonomi sosial jelas mempengaruhi cara pandang dan intensi aksi guru di Indonesia.





Gambar 5.16. Opini Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Status Ekonomi Guru



Gambar 5.17. Intensi Aksi Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia berdasarkan Status Ekonomi Guru

## VI. SUMBER PENGETAHUAN & ORMAS KEAGAMAAN.

**Media Sosial Sebagai Sumber Pengetahuan Guru.** Menurut Jewkes separuh dari anggota organisasi radikal di Arab Saudi di rektur melalui jaringan internet. Internet juga dikenal sebagai alat propaganda yang efektif, karena tidak ada aturan dalam penggunaan internet, terutama dalam hal penulisan, maka segala bentuk informasi dapat dimasukkan dalam internet. Begitu juga pembaca dapat membaca apa saja yang ada di internet, termasuk bacaan tentang agama yang tidak jelas dasarnya. Bahkan konten kebencian dengan mengatasnamakan agama akhir-akhir ini makin meningkat. Pembaca yang memiliki pengetahuan terbatas tentang agama tidak menutup kemungkinan akan menyerap informasi tanpa memfilternya kembali. Hal inilah yang kemudian memberikan kontribusi kepada tindakan intoleransi dan radikalisme.<sup>2</sup>

Internet menjadi salah satu media yang sangat extensif menyuguhkan berita-berita seputar intoleransi dan teroris. Menurut Dolnik, tayangan aksi teroris yang tidak dibarengi dengan informasi menyeluruh telah menciptakan lebih banyak pengikut teroris. Organisasi yang melakukan aksi tersebut mendapatkan julukan *resolute actor* dan mendapatkan simpati dari komunitas internasional yang tidak mau mengerti alasan dibalik aksinya.<sup>3</sup>

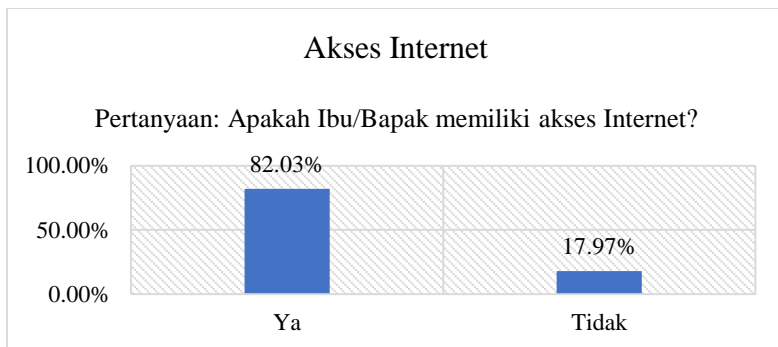
Kini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengakses informasi di sosial media mulai dari kalangan muda hingga tua, segala informasi terbuka lebar, mereka juga bebas mencari menyebarkan informasi yang didapatkannya. Bahkan tidak sedikit juga guru di sekolah yang mengakses informasi di sosial media untuk menambah ilmu pengetahuannya.

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat pada guru sekolah/madrasah di Indonesia, guru di Indonesia yang mengakses internet yaitu sebanyak 82,03% sedangkan yang tidak memiliki akses internet yaitu 17,97%. Berikut gambar grafiknya,

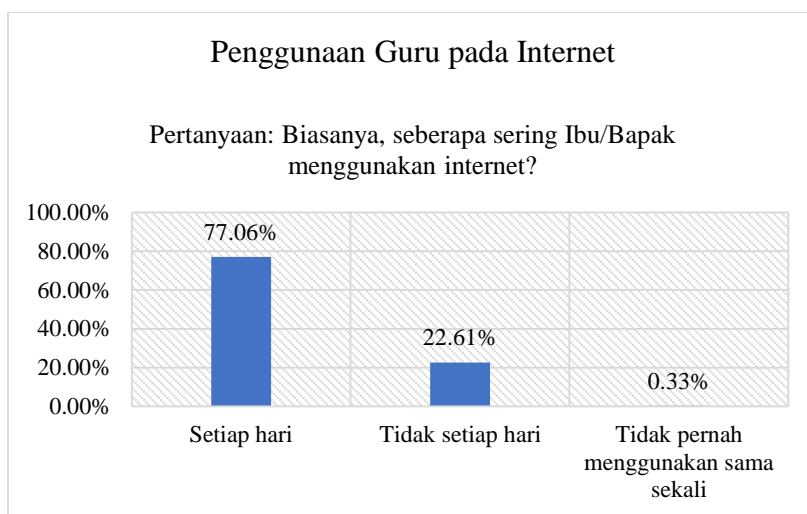
---

<sup>2</sup> Jewkes, Y. (2011). *Media and Crime* (2th ed.). Sage Publication Ltd.

<sup>3</sup> Dolnik, A. (2007). *Understanding Terrorist Innovation: Technology, Tactics and Global Trends. International Studies* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1080/17419160701693674>

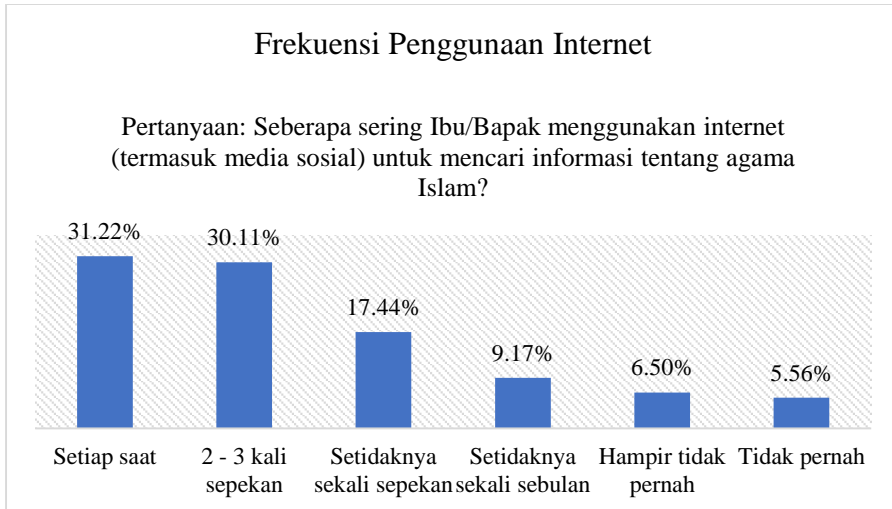


Gambar 6.1. Akses internet Guru di Indonesia



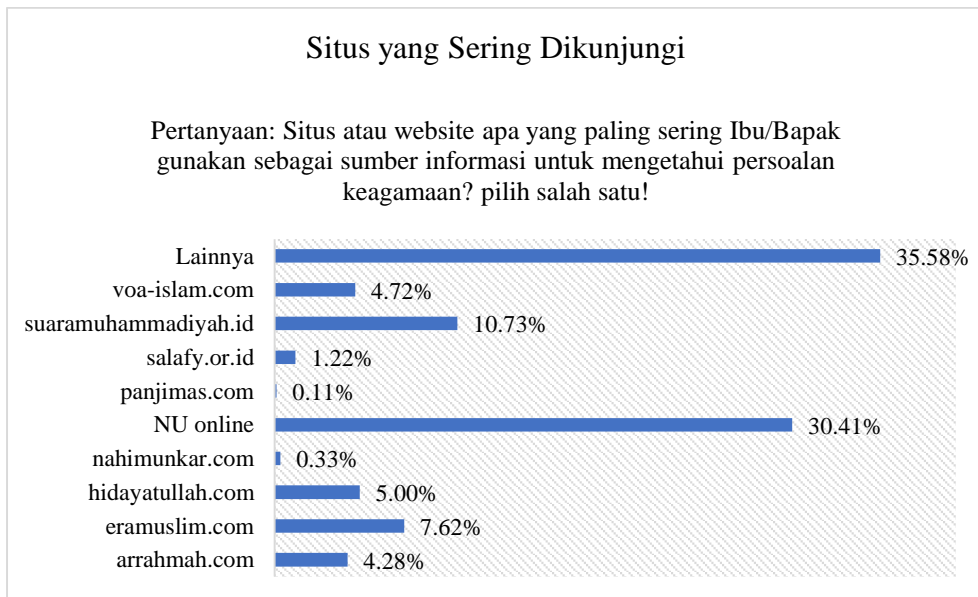
Gambar 6.2. Frekuensi Penggunaan Internet Guru

Guru di sekolah/madrasah mengakses internet terbanyak yaitu setiap hari, 77,06%; tidak setiap hari, 22,61%; dan tidak pernah menggunakan sama sekali yaitu 0,33%. Artinya bahwa media sosial utamanya internet menjadi sumber untuk mencari informasi. Guru juga menggunakan jejaring sosial seperti facebook, Twitter, WA, Line dan Instagram yaitu sebanyak 97,72%, sisanya yang tidak menggunakan yaitu 2,28%. Berikut gambar grafiknya,



Gambar 6.3. Frekuensi Menggunakan Internet untuk Informasi tentang Islam

Frekuensi penggunaan internet yang dilakukan oleh guru dari yang terbanyak yaitu setiap saat, 31,22%; 2-3 kali sepekan, 30,11%; setidaknya sebulan sekali, 9,17%; hampir tidak pernah, 6,50%; dan tidak pernah, 5,56%.



Gambar 6.4. Situs Informasi Agama Islam yang dikunjungi

Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sudah memblokir situs-situs yang dianggap radikal,

nyataya masih banyak guru di Indonesia yang mengakses sumber pengetahuan pada website/situs radikal tersebut.<sup>4</sup> Hasil survei di atas memperlihatkan bahwa antara situs radikal dan non-radikal, guru lebih banyak mengakses pada situs radikal yaitu 58,86% (Lainnya, Voal-Islam.com, Salafy.or.id, Panjimas.com, Nahimunkar.com, Hidayatullah.com, Eramuslim.com, Arrahmah.com). Sedangkan guru yang mengakses pada situs non-radikal hanya 41,14% (NU Online dan Suaramuhammadiah.id).

**Tokoh Agama yang Menjadi Panutan Guru.** Dari hasil survei, ada tujuh penceramah agama yang sering dilihat di internet/media sosial oleh guru di Indonesia. Di antaranya, dari yang teratas sampai yang terbawah yaitu Ust. Abdul Somad, 29.31%; Kh. Abdullah Gymnastiar, 11,63%; Mamah Dedeh, 9,66%; Prof. Dr. Quraish Shihab, 5,41%; Ust. Adi Hidayat, 3,58%; Ust. Maulana, 3,45%; dan terakhir KH. Mustofa Bisri, 2,91%.

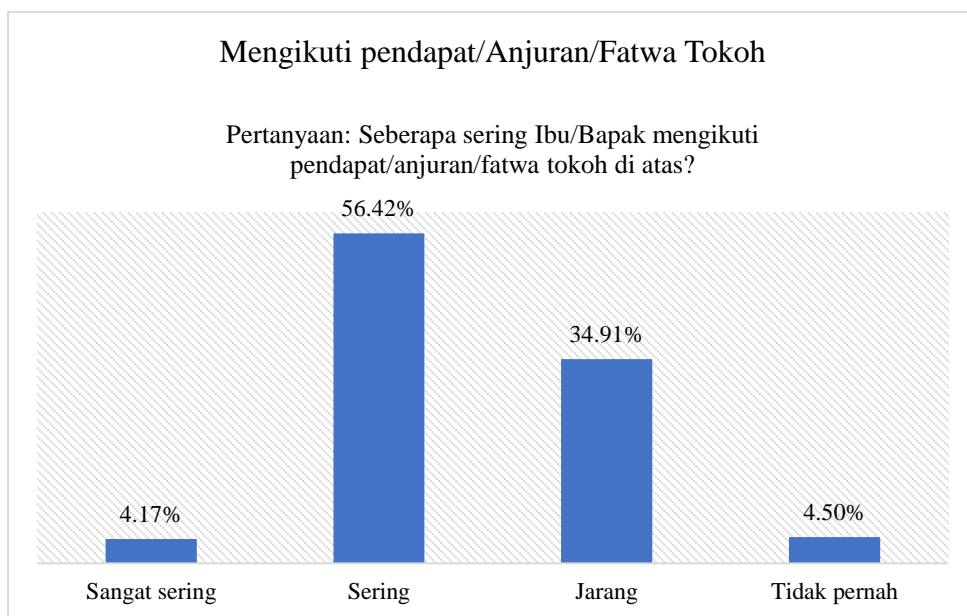


Gambar 6.5. Tokoh Agama yang Menjadi Panutan Guru

Di antara penceramah-penceramah di atas hanya dua masuk dalam kategori akademisi pilihan guru yaitu Prof. Dr. Quraish Shihab dan KH. Mustofa Bisri, jumlahnya pun tidak banyak. Guru di Indonesia lebih banyak/sering melihat penceramah-penceramah yang terkenal di media sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata skor toleransi

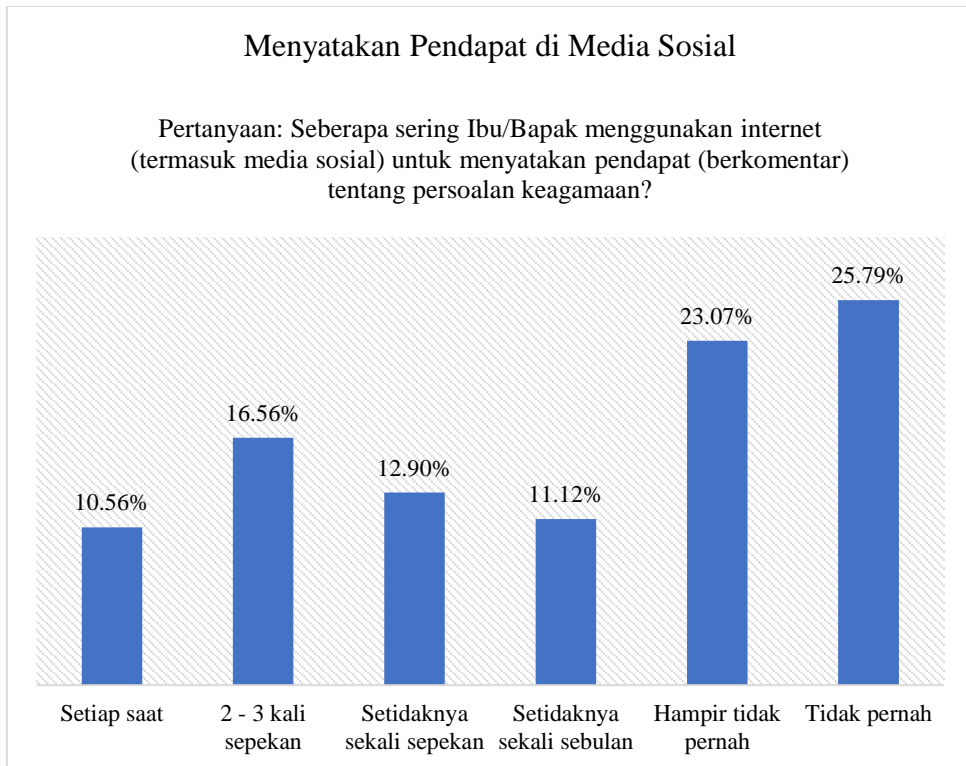
<sup>4</sup> “Kominfo Sudah Blokir 814.594 Situs Radikal”, <https://kominfo.go.id>, 6 Agustus 2015

yang paling besar adalah guru yang menjadikan Prof. Dr. Quraish Shihab sebagai tokoh panutan agama.



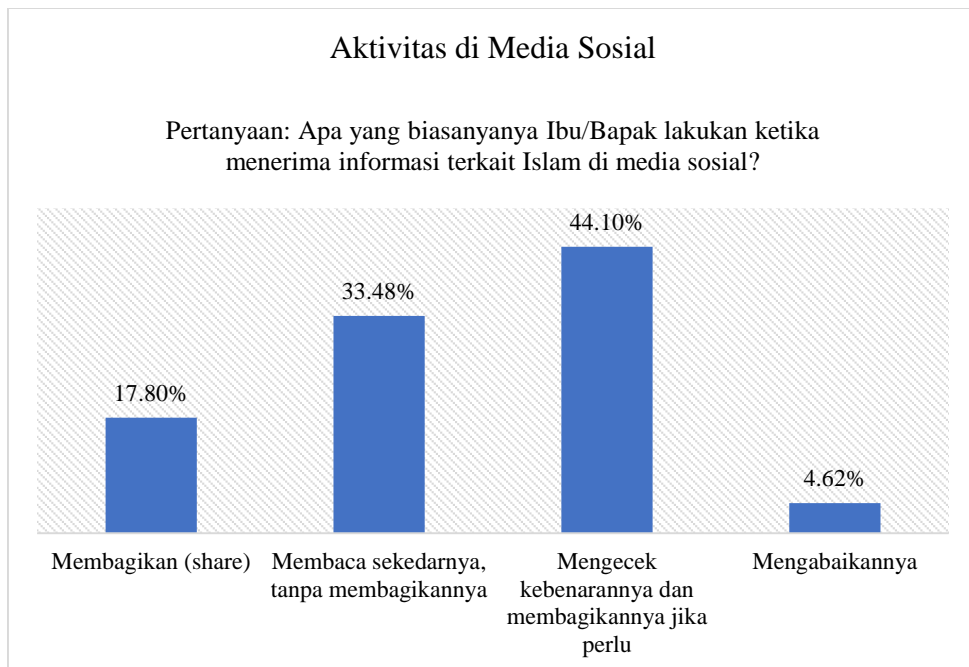
Gambar 6.6. Frekuensi Mengikuti Tokoh Agama Panutan

Selain sering melihat penceramah-penceramah agama di media sosial, guru juga sangat sering mengikuti anjuran/fatwa yang diberikan oleh penceramah. Dari data di atas, guru sering mengikuti fatwa penceramah sebanyak 56,42%; sangat sering, 4,17%. Sedangkan guru yang jarang mengikuti fatwa penceramah yaitu 34,91%, dan yang tidak pernah hanya 4,50%. Artinya bahwa, guru di Indonesia banyak yang mengambil fatwa/anjuran dari penceramah di media sosial.



Gambar 6.7. Frekuensi Menyatakan Pendapat Keagamaan di Medsos

Selain media sosial sebagai akses untuk mencari sumber pengetahuan, tidak jarang media sosial juga sebagai wadah untuk menyatakan pendapat mereka. Meskipun hasil survei nasional memperlihatkan banyak guru yang tidak pernah/hampir tidak pernah menyatakan pendapat (25,79%; 23,07%), namun banyak juga guru yang menyatakan pendapat di media sosial, ada guru yang menyatakan 2-3 kali sepekan, 16,56%; setidaknya sekali sepekan, 12,90%; setidaknya sekali sebulan, 11,12% dan setiap saat, 10,56%.



Gambar 6.8. Aktivitas Guru di Medsos saat terima Info Kelslaman

Selain menyatakan pendapat di media sosial, guru juga ditanya apa yang dilakukan jika menerima informasi terkait Islam. Hasil survei memperlihatkan, 44,10% guru mengecek kebenarannya dan membagikannya jika perlu; 33,48% guru membaca sekedarnya tanpa membagikannya; 17,80% guru membagikan/share; dan 4,62% guru mengabaikan informasi terkait Islam di media sosial.

**Ormas Keagamaan.** Temuan umum pada level tingkat guru, ada lima ormas yang dirasa dekat yaitu NU, 45,62%; Tidak Ada, 21,07%; Muhammadiyah, 18,45; Nahdlatul Wathan, 2,92%; FPI, 2,50; dan MTA, 1,40%.





Gambar 6.9. Kedekatan Guru dengan Ormas Keislaman

Secara umum, banyak guru yang memilih tidak aktif/sangat tidak aktif dengan ormas Islam di Indonesia dibandingkan dengan guru yang memilih sangat aktif/aktif. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata skor toleransi guru yang tinggi adalah guru-guru yang dekat dengan NU dan Muhammadiyah. Sementara yang merasa dekat dengan Nahdhatul Wathon dan FPI memiliki rata-rata skor toleransi yang lebih rendah.

**Organisasi Keislaman di Kampus.** Temuan secara umum pada level guru, sebanyak 63,89% memilih tidak pernah/tidak satupun berafiliasi dengan organisasi ekstra dan intra kampus; sedangkan yang memilih berafiliasi, yaitu HMI, sebanyak 12,18%; PMII, 6,64%; Lainnya, 5,18%; IMM, 5,05%; dan LDK, 4,20%.



Gambar 6.10. Pengalaman Guru dalam Organisasi Kemahasiswaan

Dari hasil survei menunjukkan bahwa urutan rata-rata skor toleransi guru yang tinggi ke yang rendah adalah guru-guru yang aktif di organisasi GMNI, PMII, HMI, LDK, dan KAMMI.

## VI KESIMPULAN & REKOMENDASI

**Kesimpulan.** Hasil survei ini memperlihatkan bahwa radikalisme terkait dukungan Negara Islam dan intoleransi sedang mengancam guru-guru kita dari guru level TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.. Walaupun perilaku mereka cenderung moderat, namun dari sisi opini persentase yang intoleran lebih besar dibandingkan yang toleran. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena sikap yang radikal dan intoleran tersebut bisa menjadi jembatan bagi lahirnya perilaku radikal dan intoleran.

Beberapa variabel penting yang diuji juga memiliki pengaruh terhadap radikalisme dan intoleransi guru sekolah/madrasah di Indonesia. Misalnya pandangan Keislaman guru yang eksklusif dan inward looking menjadikannya kurang terbuka dengan pandangan keislaman lain serta kelompok lain. Guru-guru kita sebagian besar memiliki akses internet, dan teknologi tersebut sangat dominan

dipakai untuk mencari sumber pengetahuan agama karena waktunya lebih banyak digunakan untuk mengajar. Sayangnya situs-situs yang dikelola oleh kalangan radikal populer di kalangan mereka. Begitu pun dengan ustadz-ustadz yang mereka lihat di internet atau sosial media, beberapa ustadz yang dinilai sering menyebarkan ujaran kebencian dan paham radikal juga cenderung populer di kalangan mereka.

Semua pihak –baik negara, ormas Islam *mainstream*, lembaga riset, maupun NGO –harus secara serius menangani masalah ini. Ormas Islam *mainstream* bisa lebih aktif menyebarkan pesan-pesan toleransi dan kedamaian melalui media-media yang bisa diterima oleh guru sekola/madrasah. Hal ini karena pada kenyataannya ruang digital dalam beberapa hal banyak dikuasi oleh kalangan radikal. Selain itu, negara dalam hal ini Kemenag dan Kemendikbud, diharapkan membuat reformasi mengenai pembelajaran PAI, mulai dari rekrutmen guru, menambah porsi toleransi dalam materi dan pembelajaran PAI, serta melakukan penetrasi dalam melakukan pengawasan terhadap ekstrakurikuler keagamaan yang dinilai menjadi pintu masuk radikalisme di sekolah.

**Rekomendasi.** Hasil survei menunjukkan bahwa penghasilan guru berkorelasi dengan kecenderungan intoleransi dan radikalisme. Untuk itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pengambil kebijakan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini adalah dengan membuat standar pembayaran minimal guru yang lebih baik, tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta.

Pendidikan di TK/RA penting dalam penanaman nilai-nilai dasar siswa, yangmana siswa TK berada dalam masa penting penanaman nilai untuk masa depannya. Hasil survei ini menunjukkan bahwa guru TK/RA memiliki opini intoleran dan radikal dibandingkan guru level pendidikan lainnya. Betapa pun begitu, penting untuk meningkatkan pengalaman guru TK dalam situasi keberagaman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa guru perempuan lebih intoleran dibandingkan laki-laki. Ini sedikit banyak berkaitan dengan tren majelis taklim perempuan yang cenderung meningkat dan seringkali menjadi

“sasaran” dakwah kelompok-kelompok intoleran/eksklusif. Untuk itu, perhatian terhadap guru perempuan dalam kaitannya dengan penyebaran Islamisme harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh.

Guru madrasah memiliki opini yang cenderung lebih intoleran pada pemeluk agama lain dibandingkan guru sekolah. Betapa pun hal ini bisa dipahami karena sifat pendidikan madrasah yang homogen, namun berbagai program yang memberikan kesempatan kepada guru madrasah untuk meningkatkan pengalaman kemajemukan perlu dilakukan.

Untuk itu, perlu berbagai program yang memberikan kesempatan pada guru madrasah untuk mendapat pengalaman dalam lingkungan yang majemuk dan beragam, meningkatkan religious literasi pada guru madrasah agar lebih mengenal agama dan kelompok yang berbeda.

Salah satu cara yang efektif untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan kemajemukan para guru baik yang mengabdikan di sekolah/madrasah negeri maupun swasta adalah pemberdayaan lembaga-lembaga yang memproduksi guru, seperti LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) harus menjadi prioritas utama sebagai bagian dari upaya pencegahan meluasnya paham intoleran dan eksklusif. Hal yang sama juga harus dilakukan pada lembaga Pendidikan Profesi Guru (PPG), Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) yang menjadi garda depan yang menciptakan “pelita” yang mampu menerangi jalan peserta didik dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## PROFIL PENULIS

**Yunita Faela Nisa** adalah peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) yang merupakan koordinator survei nasional PPIM tentang Sikap Keberagamaan Siswa/Mahasiswa dan Guru/Dosen di Indonesia tahun 2017 dan 2018. Lulusan S3 dalam bidang Psikologi Sosial di Universitas Indonesia 2015 ini menulis disertasi tentang Perilaku Meneruskan Berita Daring di Indonesia: *Narrowcast* versus *Broadcast*. Minat risetnya meliputi problem sosial masyarakat dan intervensi sosial, psikologi tentang intoleransi dan radikalisme, pendidikan serta perilaku manusia di dunia maya. Keahliannya terkait metodologi penelitian dan statistika mendukungnya dalam berbagai penelitian yang ia lakukan. Beberapa grant yang pernah ia dapatkan seperti International Travel Award for Psychology Student dari APA (American Psychological Association) 2015 di Toronto Canada, Tahun 2018, ia menerima The Witkin-Okonji Travel Award untuk berpartisipasi dalam the 24 th International Congress of Cross-Cultural Psychology di Guelph, Canada. Pengalamannya ini memperkaya pengetahuannya tentang tren kemajuan riset global, serta perkembangan keilmuan global, khususnya di bidang Psikologi dan Sosial.

## PROFIL LEMBAGA

**Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta** merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak tahun 2017 melakukan program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia. Sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal ***Studia Islamika***, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.

## **BIBLIOGRAFI**

### ***Buku, Jurnal, dan Dokumen***

- Almond, Gabriel and Sidney Verba (1963). "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations." Princeton: Princeton University Press.
- Anderson, James dan Ian Shuttleworth (1998). "Sectarian Demography, Territoriality and Political Development in Northern Ireland." *Political Geography*, Vol. 17, No. 2, pp. 187-208, 1998.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner (2010). "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia" dalam Robert W. Hefner & Muhammad Qasim Zaman (edt.) "Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education". Princeton: Princeton University Press.
- Bartlett Jamie, Jonathan Birdwell, & Michael King (2010). "The Edge of Violence: a Radical Approach to Extremism." London: Demos.
- Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI).
- Bruinessen, Martin van (2008). "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen "The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages." Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bryner, Karen (2013). "Piety Projects: Islamic Schools for Indonesia's Urban Middle Class". Dissertation: Columbia University.
- Diamond, Larry (1999). "Developing Democracy: Toward Consolidation." Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Elihami (2016). "The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism." *Journal of Education and Human Development* Vol. 5, No.4, pp.211-221.
- Esteban J, & Ray, D. (2011). "A model of ethnic conflict." *Journal of the*

- Feith, Herbert & Lance Castles (1988). "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965." Jakarta: LP3ES.
- Fuller, Graham E. (2004) "The Youth Crisis in Middle Eastern Society", Michigan: Institute for Social Policy and Understanding.
- Gurr, Ted Robert. "Economic Factors" dalam, Louis Richardson (2006). "The Roots of Terrorism." London and New York: Routledge.
- Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The radicalization puzzle: a theoretical synthesis of empirical approaches to homegrown extremism. *Studies in Conflict & Terrorism*.
- Hasan, Noorhaidi (2008). "The Salafi Madrasas of Indonesia" dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen "The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages." Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hefner, Robert W (2009). "Islamic Schools, Social Movement, and Democracy in Indonesia" dalam Robert W. Hefner (edt.) "Making Modern Muslim: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia". Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Alan B. Krueger (2007) "What Makes a Terrorist: Economic and the Roots of Terrorism." Princeton: Princeton University Press.
- Kusmanto, Thohir Yuli, Moh. Fauzi dan M. Mukhsin Jamil (2015). "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren." *Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015*.
- Lukens-Bull, Ronald A (2013). "Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict." New York: Palgrave MacMillan.
- Lundberg, George A (1927). "The Demographic and Economic Basis of Political Radicalism and Conservatism." *American Journal of Sociology*, Vol. 32, No.5 (Mar., 192), pp. 719-732.
- Makruf, Jamhari (2014). "Incubator for Extremism? Radicalism and Moderation in Indonesia's Islamic Education System." Policy Paper: Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS).
- Maksum, Ali (2015). "Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf", *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 1, Mei 2015, Hal 82- 108*.

- McCauley, C., & Moskaleiko, S. (2011). *Friction: How radicalization happens to them and us*. oxford university Press.
- McCauley, Clark dan Sophia Moskaleiko (2017). "Understanding Political Radicalization: The Two-Pyramids Model." *American Psychological Association, Vol. 72, No.3, pp. 2015-216*.
- Menchik Jeremy (2017). "Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism." New York: Cambridge University Press.
- Mubarak, M. Zaki (2013). "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Ma'arif Vol.8, No. 1-Juli 2013*.
- Mursalim, Ayub dan Ibnu Katsir (2010). "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-Pesantren di Provinsi Jambi", *Kontekstualika, Vol. 25, No.2, 2010*.
- Panggabean, Rizal dan Benjamin Smith (2011). "Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20<sup>th</sup> Century Indonesia." *World Development, Vol.99, No.2, pp. 231- 242, 2011*.
- Piazza, James A (2006) "Rooted in Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages , Terrorism and Political Violence, 18:1, 159-177.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah." Laporan Hasil Penelitian
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). "Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia." Laporan Hasil Penelitian.
- Ropi, Ismatu (2017). "Religion and Regulation in Indonesia." Singapore: Springer.
- Richards A (2003). "Socio-Economic roots of Radicalism? Towards explaining the appeal of Islamic Radicals." DIANE Publishing.
- Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.



- Silber, Mitchell D. & Arvin Bhatt (2007). "Radicalization in the West: The Homground Threat," dalam McCauley, C., & Moskalenko, S. (2017). "Understanding political radicalization: The two-pyramids model." *American Psychologist*, 72(3), 205.
- Smith, Bianca J, dan Mark Woodward (edt.) (2014). "Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves." New York: Routledge.
- Solahudin, Dindin (2008). "The Workshop for Morality: The Islamic Creativity of Pesantren Daarut Tauhid in Bandung, Java." Canberra: ANU E Press.
- Stevenson, Paul (1977). "Frustration, Structural Blame, and Leftwing Radicalism." *The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie*, Vol.2, No.4 (Autumn, 1977), pp. 355-372.
- Tan, Charlene (2011). "Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia." New York: Routledge.
- Wahid, Din. Book Review Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia, Martin van Bruinessen, ed, *Contemporart Development in Indonesian Islam, Explaining the "Conservative Turn"*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013, pp. 240 + xxxiv, dalam *jurnal Studia Islamika*, Vol. 21, No. 2 tahun 2014
- Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri." Laporan Hasil Penelitian.
- Ware, Helen (2005). "Demography, Migration and Conflict in the Pacific." *Journal of Peace Research*, Vol. 42, No.4, *Special Issue on the Demography of Conflict and Violence (Jul., 2005)*, pp. 435-454.

## **Website**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia [www.bkkbn.go.id/detailpost/negara-harus-siap-bonus-demografi](http://www.bkkbn.go.id/detailpost/negara-harus-siap-bonus-demografi), 22 Agustus 2016.

Data Guru Sekolah Kemendikbud dari <http://referensi.kemdikbud.go.id/> , diakses 17 Juni 2018.

Data Guru Madrasah diambil dari [www.emispendis.kemenag.go.id](http://www.emispendis.kemenag.go.id)  
diakses 12 Juni 2018



Fostering the Role of Religious Education in  
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten  
15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)

Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*